



**LAPORAN KUNJUNGAN KERJA
KOMISI YUDISIAL RI
DI BELGIA DAN BELANDA**



Laporan Kunjungan Kerja Komisi Yudisial RI Di Belgia dan Belanda



25 – 28 Oktober 2022

Laporan Kunjungan Kerja Komisi Yudisial ke Belgia dan Belanda yang
Dipublikasikan di *Website* Komisi Yudisial

| No | Judul | Penulis |
|---|--|---|
| High Council of Justice Belgium (HCJ) | | |
| 1. | Kekuasaan Kehakiman di Belgia: Reformasi Peradilan dan Reorganisasi Sistem Peradilan | Ikhsan Azhar dan Dini Wahyuni |
| 2. | Dresser: Sejarah, Misi, Komposisi, dan Sumber Daya HCJ | Ikhsan Azhar dan Dini Wahyuni |
| 3. | Komisi Pencalonan dan Pengangkatan HCJ | Ikhsan Azhar dan Dini Wahyuni |
| 4. | Komisi Penasihat dan Investigasi HCJ | Ikhsan Azhar dan Dini Wahyuni |
| 5. | Etika Hakim | Ikhsan Azhar dan Dini Wahyuni |
| 6. | Seleksi Calon Hakim Agung dan Keamanan Hakim | Ikhsan Azhar dan Dini Wahyuni |
| Instituut voor Gerechtelijke Opleiding (IGO) | | |
| 7. | Ransbeeck: Sejarah Singkat, Struktur Kelembagaan, dan Kedudukan IGO | Ikhsan Azhar |
| 8. | Tugas dan Anggaran | Ikhsan Azhar |
| 9. | Ruang Lingkup dan Metode Pelatihan | Ikhsan Azhar |
| 10. | Cara Menentukan Jenis Pelatihan dan Evaluasi Pelatihan | Ikhsan Azhar |
| European Networks of Councils for the Judiciary (ENCJ) | | |
| 11. | Sejarah, Kedudukan, Struktur, dan Tujuan Pembentukan ENCJ | Ikhsan Azhar, Dini Wahyuni, dan Anggi Quartri |
| 12. | ENCJ di masa Jabatan 2022-2025 | Ikhsan Azhar, Dini Wahyuni, dan Anggi Quartri |
| 13. | ENCJ mempromosikan <i>Rule of Law</i> dan Independensi Peradilan | Ikhsan Azhar, Dini Wahyuni, dan Anggi Quartri |
| 14. | Proyek Independensi dan Akuntabilitas ENCJ | Ikhsan Azhar, Dini Wahyuni, dan Anggi Quartri |
| Raad voor de Rechtspraak (RvdR) | | |
| 15. | Kelembagaan <i>Raad voor de Rechtspraak</i> | Ikhsan Azhar dan Agus Susanto |
| 16. | Proses Penganggaran Pengadilan dan Besaran Alokasi per Kasus | Ikhsan Azhar dan Agus Susanto |
| 17. | Sistem Penjaminan Mutu Peradilan | Ikhsan Azhar dan Agus Susanto |
| The Hoge Raad der Nederlanden (HR) | | |
| 18. | Sejarah, Tugas, dan Struktur Organisasi HR | Ikhsan Azhar, Dini Wahyuni, dan Anggi Quartri |
| 19. | Seleksi Hakim Agung di Belanda | Ikhsan Azhar, Dini Wahyuni, dan Anggi Quartri |
| 20. | Kamar Keempat | Ikhsan Azhar, Dini Wahyuni, dan Anggi Quartri |

Kekuasaan Kehakiman di Belgia: Reformasi Peradilan dan Reorganisasi Sistem Peradilan



Kiri ke Kanan: Fajar Firdaus, Agus Susanto, Ikhsan Azhar, Anggi Quartri Sitohang, Amzulian Rifai, M. Taufiq HZ, Lucia Dresser, Daan Vuverman, Natalie Callebaut, Dini Wahyuni, Valerie Delfosse, dan Binziad Kadafi

Brussel, 25 Oktober 2022

Pada 25-28 Oktober 2022, Komisi Yudisial (KY) melakukan kunjungan kerja ke Belgia dan Belanda. Kunjungan kerja ini secara umum guna mempelajari dan mendalami kekuasaan kehakiman di kedua negara, pelaksanaan wewenang dan tugas lembaga peradilan dan lembaga sejenis KY di Belgia dan Belanda, juga mekanisme pelaksanaan pelatihan hakim di Belgia. Sehubungan hal tersebut, KY mengadakan pertemuan dengan 5 (lima) lembaga.

Kelima lembaga yang dikunjungi adalah 3 (tiga) lembaga di Belgia, yaitu *High Council of Justice Belgium* (HCJ, KY Belgia), *Institut voor Gerechtelijke Opleiding* (IGO) atau Lembaga Pelatihan Yudisial, dan *European Networks of Councils for the Judiciary* (ENCJ), dan 2 (dua) lembaga di Belanda, yaitu *The Netherlands Council for Judiciary/Raad voor de Rechtspraak* (RvdR, KY Belanda), juga *The Hoge Raad der Nederlanden* (Mahkamah Agung Belanda). Dalam kunjungan kerja ini, delegasi KY terdiri atas Wakil Ketua KY, M. Taufiq HZ beserta Anggota KY Binziad Kadafi dan Amzulian Rifai. Ketiganya didampingi oleh 4 (empat) orang pegawai Sekretariat Jenderal KY, yaitu Agus Susanto, Ikhsan Azhar, Anggi Quratri Sitohang, dan Dini Wahyuni.

Kunjungan kerja KY di Belgia dan Belanda dimulai pada Selasa, 25 Oktober 2022, pukul 10.00 waktu setempat. Lembaga pertama yang KY kunjungi adalah HCJ.

Dalam pertemuan dengan HCJ, delegasi KY diterima oleh Lucia Dresser, yang merupakan *President* HCJ, Natalie Callebaut, yang bertugas pada bidang seleksi hakim, kemudian Valerie Delfosse yang merupakan *President* Bidang Investigasi dan Rekomendasi, serta Daan Vuverman yang bertugas di Bidang Audit Administrasi Lembaga Peradilan.

Kekuasaan Kehakiman di Belgia

Dresser mengawali pertemuan dengan menjelaskan secara singkat sistem kelembagaan di Belgia. Pada paparannya Dresser menyampaikan ciri dari sistem kelembagaan di Belgia, yaitu:

1. Sistem monarki di mana Raja sebagai pimpinan negara, hanya menandatangani nama-nama hakim dan jaksa yang lolos seleksi dari HCJ;
2. Demokrasi perwakilan dan demokrasi parlementer;
3. Negara federal yang terdiri dari tiga wilayah dan tiga komunitas;
4. Tiga bahasa resmi, yaitu Perancis, Belanda, dan Jerman;
5. Beberapa level politik.

Di Belgia, tiga kekuasaan negara terdiri dari kekuasaan legislatif yaitu senat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Raja; kemudian kekuasaan eksekutif, terdiri dari Raja dan Pemerintah yang menjalankan negara, juga memastikan hukum diterapkan sesuai dengan aturan yang berlaku; dan terakhir kekuasaan yudikatif, yakni lembaga peradilan. Dalam pelaksanaan ketiga kekuasaan tersebut, ternyata antara satu kekuasaan dengan kekuasaan yang lain tidak ada pemisahan kekuasaan secara mutlak. Setiap kekuasaan mengawasi dan membatasi kewenangan lainnya.

Reformasi Peradilan, Reorganisasi Sistem Peradilan

Reformasi peradilan dan reorganisasi sistem peradilan dilakukan dengan cara mengurangi jumlah distrik yudisial (termasuk jumlah pengadilan dan kantor kejaksaan); struktur manajemen baru untuk pengadilan dan penuntutan umum; pembentukan perguruan tinggi bagi hakim, dan manajemen otonom dari cabang kekuasaan yudikatif. Tujuan dari reformasi peradilan dan reorganisasi sistem peradilan tersebut adalah untuk meningkatkan mobilitas hakim dan jaksa, meningkatkan spesialisasi, dan membentuk peluang manajemen (meningkatkan efektivitas and efisiensi, pendayagunaan SDM) secara lebih baik.

Susunan Kekuasaan Kehakiman di Belgia sejak 2014

Sejak tahun 2014 hingga saat ini susunan kekuasaan kehakiman di Belgia terdiri dari:

1. Mahkamah Agung (MA) yang terdiri dari 20-25 hakim agung;
2. 5 pengadilan banding, dan 5 pengadilan buruh banding;

3. 13 pengadilan tingkat pertama;
4. 9 pengadilan buruh;
5. 9 pengadilan komersial;
6. 15 pengadilan militer; dan
7. 162 hakim perdamaian, yaitu pejabat peradilan di pengadilan yang lebih rendah atau *puisne*, yang dipilih atau ditunjuk oleh sebuah komisi (paten surat).

Di samping Mahkamah Agung, di Belgia juga terdapat satu Mahkamah Konstitusi; satu Dewan Negara (*Council of State*), dan beberapa pengadilan administrasi (yang menangani sengketa di bidang hukum imigrasi atau hukum lingkungan, dll).

Selain lembaga-lembaga yang disebutkan di atas, di Belgia juga terdapat *Advocate General* yang tugasnya memberikan nasihat atau masukan kepada hakim agung dalam membuat putusan.

Masa Tugas dan Latar Belakang Hakim Agung

Berapa lama masa tugas Hakim Agung di Belgia, tanya Amzulian Rifai kepada Dresser?''

''Masa tugas atau masa kerja Hakim Agung di Belgia adalah seumur hidup'', jawab Dresser. Selanjutnya Dresser menambahkan dengan menyampaikan jika mayoritas Hakim Agung di Belgia itu harus memiliki riwayat akademis sebagai Profesor.

Dresser: Sejarah, Misi, Komposisi, dan Sumber Daya HCJ



Dresser sedang menjelaskan paparannya kepada delegasi KY.
Di samping kanannya terdapat Daan Vuurman, dan Valerie Delfosse.

Brussel, 25 Oktober 2022

Sejarah Pembentukan

Sejarah terbentuknya HCJ dimulai dengan adanya “Dutroux Case” pada 1996. Kasus ini merupakan kasus kriminal yang menyedihkan, dimana Dutroux diduga melakukan pelecehan seksual sekaligus pembunuhan terhadap 5 anak perempuan berusia 8 hingga 19 tahun. Sebelumnya, pada 1989, Dutroux pernah dihukum karena penculikan dan pemerkosaan 5 gadis muda. Namun, pada kasus tersebut Dutroux dibebaskan dengan pembebasan bersyarat setelah hanya menjalani hukuman penjara selama 3 tahun.

Sejumlah kekurangan di pihak Kepolisian dalam menyelidiki pembunuhan pada *Deutrox Case* mengakibatkan tuntutan dan putusan ringan terhadap Dutroux. Hal ini memunculkan ketidakpuasan yang meluas di Belgia. Ditambah lagi, saat itu terjadi perang antar kepolisian dan politisasi terhadap hakim.

Fakta-fakta di atas mendorong terjadinya pergerakan massa yang dinamakan “Pawai Putih” pada 20 Oktober 1996. Diketahui sekitar 300,000 warga Belgia turun ke jalan memprotes kesalahan penanganan kasus Dutroux. Selain itu juga terjadi kesepakatan politik global untuk mereformasi layanan peradilan dan kepolisian, yang kemudian mendorong dibentuknya HCJ di Belgia.

Misi Utama dan Misi Lainnya

Sebagai lembaga yang mempunyai peranan penting bagi peradilan, HCJ memiliki misi utama membangun kepercayaan publik terhadap sistem peradilan.

Di samping misi utama tersebut, HCJ juga memiliki beberapa misi lainnya, yang secara efektif telah dijalankan sejak Agustus 2000, di antaranya:

1. Memainkan peran yang menentukan dalam kebijakan pengangkatan anggota kehakiman, dengan bertindak secara obyektif dan dengan cara yang tidak politis;
2. Mewujudkan investigasi eksternal terhadap fungsi sistem yudisial dan penanganan pengaduan;
3. Memberikan rekomendasi bagi berfungsinya sistem yudisial yang lebih baik antara lain dengan memberikan masukan tentang undang-undang yang sedang dibahas kepada parlemen/menteri kehakiman;
4. Menetapkan prinsip-prinsip umum mengenai deontologi/etika untuk hakim dan jaksa

HCJ Lembaga yang Independen

“HCJ bukan bagian dari eksekutif, legislatif dan juga bukan bagian dari peradilan. HCJ benar-benar lembaga negara yang independen berdasarkan Pasal 151 Konstitusi Belgia dan Undang-undang No 22 Tahun 1998”, terang Dresser.

Komposisi dan Masa Jabatan Anggota HCJ

HCJ terdiri dari 44 anggota (majelis umum), yang terbagi atas 22 anggota berbahasa Belanda, dan 22 anggota berbahasa Perancis. Dari 22 anggota, 11 di antaranya berasal dari *magistrates* (hakim dan jaksa) dan 11 anggota lagi berasal dari *non-magistrates*.

Pemilihan 22 anggota yang berasal dari *magistrates* (hakim dan jaksa) tersebut dilakukan oleh rekan-rekan seprofesi. Sementara itu 22 anggota *non-magistrates* ditunjuk oleh senat, dengan minimum persetujuan 2/3 dari total anggota. Setiap anggota terdiri dari setidaknya 4 pengacara, 3 profesor universitas, dan 4 masyarakat sipil (seperti jurnalis, psikolog, auditor, dll).

Ke-44 anggota HCJ tersebut bersifat tidak permanen, dalam artian mereka tetap menjalankan profesinya semula, dan hanya 4 orang di antaranya yang diangkat dengan posisi permanen, yang mengepalai 4 Biro di HCJ. Kepemimpinan HCJ dijalankan secara bergantian oleh 4 anggota permanen tersebut secara bergantian, di mana masing-masing akan menjabat selama 1 tahun sebagai *President* HCJ. *President* memimpin majelis umum dan berbagai biro. Masa jabatan anggota HCJ adalah 4 tahun dan dapat diperbarui untuk 1 kali masa jabatan.

Anggaran

Anggaran HCJ berasal dari parlemen. Penggunaan anggaran tidak boleh melebihi batas yang telah ditetapkan parlemen. Sebagai bentuk akuntabilitas, penggunaan anggaran HCJ pada tahun sebelumnya akan diaudit oleh pengadilan auditor.

Komisi Pencalonan dan Pengangkatan HCJ



Callebaut sedang menjelaskan informasi perihal Komisi Pencalonan dan Pengangkatan.

Brussel, 25 Oktober 2022

Komposisi

Komisi Pencalonan dan Pengangkatan terdiri dari 14 anggota, yaitu 7 *magistrates* (hakim dan jaksa) dan 7 *non-magistrates*.

Kompetensi/Tugas

Kompetensi dari komisi ini adalah:

1. Penyelenggara ujian masuk peradilan;
2. Presentasi kandidat untuk nominasi sebagai hakim (seumur hidup);
3. Presentasi kandidat untuk penunjukan sebagai kepala institusi peradilan dan kejaksaan (posisi sementara), dengan masa jabatan 5 tahun dan dapat diperpanjang selama 5 tahun. Jadinya maksimum masa jabatan adalah 10 tahun;
4. Arahan tentang pelatihan hakim dan magang yudisial.

Bagaimana cara menjadi Hakim atau Jaksa di Belgia?

Di Belgia, untuk menjadi hakim atau jaksa, harus melewati beberapa tahapan, yaitu:

1. Lolos ujian;
Ujian ini diselenggarakan hanya oleh HCJ. Ujian ini terdiri atas empat jenis, yaitu:
 - a. Ujian masuk magang yudisial;

- b. Ujian bakat;
 - c. Ujian evaluasi lisan; dan
 - d. Ujian pengganti hakim/anggota dewan kehakiman.
2. Asesmen (prosedur pengangkatan);
Setelah lolos ujian, peserta dapat mendaftar pada lowongan hakim, jaksa atau pimpinan pengadilan dan kejaksaan yang tersedia.
 3. Calon jaksa, hakim, dan pimpinan pengadilan maupun kejaksaan yang telah lolos ujian akan disahkan oleh Raja.

Jenis-Jenis Ujian Menjadi Hakim dan Jaksa

Seseorang hanya bisa menjadi hakim dengan lulus ujian yang diselenggarakan oleh HCJ (kecuali Hakim Pengadilan Pasar, divisi khusus dari Pengadilan Banding Brussels). Untuk jenis ujiannya terdiri atas beberapa pengelompokkan. Lebih jelasnya sebagai berikut:

1. Ujian masuk magang yudisial
Yang ditujukan untuk calon dengan pengalaman 2 tahun/praktisi hukum. Apabila calon dinyatakan lolos ujian ini, maka calon dapat memiliki akses magang di lembaga yudisial selama 24 bulan.

Calon di tahapan ini akan diperingkat berdasarkan nilai mereka, dan jumlah peserta yang lolos ditentukan oleh pimpinan negara/Raja.
2. Ujian bakat
Ditujukan bagi calon yang memiliki pengalaman 4 tahun/praktisi hukum. Sertifikat ujian ini bersifat generik, berlaku umum selama 7 tahun. Seseorang yang memiliki sertifikat ini memiliki peluang karier yang luas. Contoh, jika seseorang lolos ujian pada hukum pidana, dia juga dapat melamar menjadi hakim perdata, hakim pidana anak, dll.
3. Ujian evaluasi lisan
Ujian ini ditujukan bagi calon yang memiliki pengalaman minimum 20 tahun sebagai pengacara. Untuk ujian ini terdapat akses terbatas ke magistrasi (total tidak boleh melebihi 15%). Sertifikat pada ujian ini berlaku selama 7 tahun.
4. Ujian pengganti hakim/anggota dewan kehakiman (sejak 2020)
Ujian ini baru dibentuk pada 2020, berdasarkan rekomendasi dari GRECO, yaitu badan antikorupsi Eropa. Ditujukan bagi calon yang memiliki pengalaman 5 tahun di bidang profesional/praktisi hukum. Sertifikat berlaku selama 7 tahun. Bagi yang ingin mengikuti ujian evaluasi lisan, harus menjabat terlebih dahulu selama 5 tahun, kemudian harus memenuhi hanya 15 tahun (bukan 20 tahun) dari praktik pengacara. Jadi syarat ini berbeda dengan syarat ujian evaluasi lisan yaitu pengalaman minimum 20 tahun. Untuk yang satu ini syarat mengikuti ujian evaluasi lisan hanya dibutuhkan pengalaman minimum 15 tahun.

Pedoman Umum untuk Mencapai Seleksi Hakim yang Berkualitas Tinggi

Dalam melakukan seleksi yang berkualitas tinggi, komisi ini membuat pedoman umum yang perlu diperhatikan dan dilaksanakan. Pedoman umum tersebut terdiri dari:

1. Motivasi dan kecepatan mengambil keputusan;
2. Koherensi;
3. Pendekatan yang berfokus pada masyarakat;
4. Pelatihan anggota komisi (seminar, kelompok diskusi);
5. Evaluasi berkelanjutan dan penyesuaian alat seleksi;
6. Merangsang minat untuk jabatan hakim (pameran karir, presentasi).

Terjadi Penurunan Minat dan Melakukan Evolusi

Belgia mengalami penurunan minat terhadap jabatan hakim dan jaksa pada saat ini. Hal ini yang kemudian mendorong HCJ berusaha menarik minat praktisi hukum untuk melamar jabatan-jabatan tersebut dan memperluas subjek calon potensial yang dapat lolos dalam ujian yang diselenggarakan oleh HCJ.

Ketika seleksi dilaksanakan dengan penekanan kuat pada pengetahuan, seperti 1) menulis esai; 2) ujian pilihan ganda; 3) menyusun putusan, dan sebagainya, ternyata berdampak pada banyaknya kritik yang disampaikan kepada HCJ. Kritik-kritik tersebut, di antaranya:

1. Seleksi yang ditekankan pada pengetahuan merupakan bentuk kesangsian terhadap keilmuan pelamar. Pelamar memiliki gelar akademik dan telah melewati ujian untuk mendapatkan gelar tersebut di universitas, sehingga seharusnya tidak perlu lagi ada ujian yang berbasis pengetahuan seperti ini;
2. Pengetahuan adalah keterampilan yang diperlukan bagi seorang hakim, tetapi tidak dengan sendirinya menyiratkan bahwa seseorang memiliki keterampilan yang diperlukan untuk menjadi hakim yang baik.

Atas kritik tersebut, HCJ kemudian melakukan evolusi dalam pelaksanaan seleksi. Saat ini, HCJ melaksanakan seleksi dengan penekanan pada kemampuan (bukan pengetahuan), yang berhubungan erat dengan jabatan hakim dan jaksa. Kompetensi yang dimaksud adalah:

1. Pemikiran hukum;
2. Analisis kasus;
3. Kemampuan untuk memberikan solusi yang benar secara hukum dan pada saat yang sama dapat dibenarkan secara sosial untuk suatu masalah, dan untuk memotivasi keputusan ini.

Di samping itu, terdapat pengurangan tahapan ujian. Mulanya ujian yang dilaksanakan dalam 3 tahap, diubah menjadi 2 tahap, yaitu ujian tertulis dan lisan.

Selain seleksi terhadap kompetensi di atas, sejak 2010 HCJ juga telah memperkenalkan asesmen psikologi, yang meliputi:

1. Tes kemampuan kognitif (penilaian kecerdasan umum);
2. Tes kepribadian (kuesioner) dan wawancara dengan psikolog;

Asesmen ini digunakan sebagai sumber informasi tambahan untuk ujian lisan. Tujuannya adalah untuk memberikan wawasan tentang keterampilan kandidat sehubungan dengan kompetensi yang diperlukan untuk jabatan hakim dan jaksa, seperti kemampuan untuk membuat putusan, integritas, dll.

Penggunaan Manajemen Mutu dan Pendekatan yang Berfokus pada Pelanggan

1. Analisis dan penyesuaian penilaian yang berkesinambungan;
Yaitu dengan menawarkan lebih banyak peluang kepada subyek berbeda yang potensial lolos ujian;
2. Transparansi terhadap kandidat;
 - a. Kandidat diberikan kumpulan informasi perihal seleksi sebelum ujian dilaksanakan. Tujuannya agar kandidat dapat mempersiapkan diri dengan baik. Misal, pada saat masa penjarangan, melalui website resminya HCJ mempublikasikan beberapa contoh ujian sebelumnya.
 - b. Jadwal ujian diumumkan tepat waktu. Hal ini agar memudahkan calon untuk mempersiapkan diri lebih baik
 - c. Umpan balik diberikan kepada pelamar yang tidak berhasil lolos dalam ujian.
3. Obyektivitas;
 - a. Ujian tertulis dikoreksi secara anonim.
 - b. Koreksi oleh sejumlah anggota, yang hasil akhirnya adalah rata-rata dari nilai individu.
4. Persiapan ujian oleh kelompok diskusi, yang terdiri dari beberapa anggota komisi nominasi.

Prosedur Pencalonan menuju Pencalonan Formal oleh Raja

Berikut prosedur atau tahapan teknis yang akan dilakukan kandidat untuk menjadi hakim dan jaksa:

1. Untuk penunjukan Ketua Pengadilan, seluruh peserta mendaftar melalui aplikasi dengan prosedur elektronik dalam waktu 20 hari setelah publikasi tawaran pekerjaan dalam jurnal resmi Belgia;
2. Semua dokumen mengenai pengalaman profesional dan CV harus diserahkan. Jika tidak, maka aplikasi calon tidak dapat diterima;
3. Penunjukan ketua pengadilan dilakukan dengan menilai rencana manajemen dan harus lulus penilaian;

4. Untuk semua calon diminta saran (wajib) dari ketua pengadilan, pengacara, dll
 - a. Diperlukan pengakuan penerimaan dan kandidat dapat mengomentari saran tersebut;
 - b. Saran yang hilang atau tidak valid tidak memiliki dampak negatif pada berkas kandidat

Selanjutnya, Kementerian Kehakiman akan mengirimkan berkas-berkas calon yang dapat diterima ke HCJ;

1. Berkas setiap kandidat hanya berisi dokumen yang ditentukan berdasarkan undang-undang;
2. Untuk setiap lowongan, seorang kandidat harus diajukan oleh HCJ dalam jangka waktu 40 hari
 - a. 10 dari 14 anggota harus hadir: hal ini berkontribusi pada legitimasi keputusan;
 - b. kode etik: anggota tidak diperbolehkan untuk mengambil bagian dalam rapat jika hubungan mereka dengan kandidat tertentu terlalu dekat (keluarga, teman, dll): objektivitas dan pengakuan keputusan;
 - c. kandidat diajukan oleh mayoritas dua pertiga suara.

Tahapan berikutnya adalah komisi ini akan menyelenggarakan rapat dengar pendapat dengan semua kandidat untuk setiap lowongan.

1. Meskipun rapat dengar pendapat para kandidat bersifat opsional, setiap kandidat tetap akan didengar pendapatnya. Tujuannya adalah untuk menjamin pandangan yang lebih baik, lebih transparan, dan pendekatan yang lebih berfokus pada masyarakat;
2. Setiap rapat dengar pendapat direkam. Berkas rekaman ini dikirimkan ke dewan negara (pengadilan administratif);

Kandidat yang Paling Terampil dan Tepat Diajukan kepada Kepala Negara

Untuk tahapan terakhir ini, setiap calon yang diajukan ke Kepala Negara akan dipublikasi ke publik melalui situs atau web HCJ. Dalam menentukan kandidat yang akan dipilih, Kepala Negara mempunyai poin-poin yang perlu dinilai, yaitu:

1. Presisi;
2. Perbandingan gelar dan prestasi;
3. Alasan yang relevan dan beralasan;
4. Fokus pada persyaratan prosedural.

Kepala negara dapat menolak calon, tetapi hanya dengan alasan yang eksplisit. Yang menarik adalah sejak 2008, kepala negara tidak pernah menolak calon yang diusulkan. Pada 2022 kepala negara menolak satu orang calon. Hal ini dikarenakan calon tersebut meminta kepala negara untuk menolak pencalonannya, dengan alasan dia tidak terlalu tertarik untuk menjadi hakim di pengadilan banding.

Komisi Penasihat dan Investigasi HCJ



Daan Vuurman terlihat menjelaskan poin-poin yang berkaitan dengan Komisi Penasihat dan Investigasi

Brussel, 25 Oktober 2022

Komposisi

Berbeda dengan Komisi Pencalonan dan Pengangkatan yang terdiri dari 14 Anggota, komisi ini hanya terdiri dari 8 anggota. Ke-8 anggota itu berasal dari 4 *magistrates* (hakim/jaksa) dan 4 orang *non magistrates*

Pada komisi ini setiap kelompok bahasa (Belanda/Perancis) memiliki komisi sendiri (AOC/CAE) = AIC bersama-sama. Komisi-komisi ini membentuk komisi penasihat dan investigasi bersatu (VAOC/CAER) = United-AIC.

Kompetensi

Kompetensi dari komisi ini adalah:

1. Menangani keluhan-keluhan (2 AIC), yaitu kompetensi dari komisi yang berbahasa Perancis dan Belanda;
2. Menyiapkan pendapat dan proposal nasehat tentang fungsi pengadilan dan penuntutan umum (U-AIC), dilakukan oleh satu komisi yang merupakan gabungan dari komisi berbahasa Perancis dan Belanda; dan
3. Menyelidiki dan mengaudit fungsi pengadilan dan penuntutan umum (U-AIC), yang juga dilakukan oleh satu komisi yang merupakan gabungan dari komisi berbahasa Perancis dan Belanda.

Pedoman dan Penjelasan Penanganan Aduan/Laporan

1. Laporan
Laporan dalam bentuk surat yang berisikan nama, tanda tangan dan tanggal. Selain itu juga harus mengandung fakta yang cukup jelas
2. Pemeriksaan
Poin penting dari pemeriksaan atas laporan yang menjadi fokus perhatian komisi ini adalah:
 - a. berkenaan dengan fungsi peradilan;
 - b. tidak ada investigasi pidana/tidak ada proses disipliner;
 - c. tidak ada kritik terhadap isi putusan pengadilan;
 - d. penyelidikan dengan meminta informasi lebih lanjut dari ketua pengadilan, jaksa penuntut umum, dll.
3. Keputusan
Pasca pemeriksaan dilakukan, maka komisi ini akan membuat laporan dan menetapkan keputusannya. Adapun keputusan yang ditetapkan berkaitan:
 - a. jika pengaduan itu beralasan, tidak ada konsekuensi langsung;
 - b. lebih merupakan kepuasan moral;
 - c. dapat mengarah pada rekomendasi;
 - d. dapat digunakan untuk analisis risiko untuk merencanakan audit.

Pada 2021, terjadi pergeseran fokus atau substansi dari laporan masyarakat terhadap hakim. Laporan yang ditangani oleh komisi ini pada 2021 terutama menyangkut:

1. Substansi dari putusan pengadilan;
2. Jalannya persidangan atau tidak menyangkut fungsi peradilan.

Laporan atas kedua hal tersebut menjadikan pelapor sering salah menganggap HCJ sebagai pengadilan banding atau yang dapat mengintervensi proses yang sedang berlangsung.

Audit

Untuk audit, HCJ melalui komisi ini:

1. Melakukan investigasi secara independen, objektif, dan terpercaya;
Bagaimana kegiatan dan proses kerja peradilan sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi, efisiensi dan efektivitas; di mana ada ruang untuk perbaikan.

2. Mencoba membantu peradilan dengan cara:
 - a. menawarkan wawasan dan perspektif analitis baru;
 - b. memberikan sudut pandang independen berdasarkan fakta-fakta yang telah terbukti dengan memberikan rekomendasi;
3. Dapat melakukan setiap jenis audit (audit kinerja, audit operasional, audit kepatuhan, dll);
4. Evolusi dari investigasi *ad hoc* oleh anggota HCJ di awal menuju layanan audit profesional (auditor terlatih-kepatuhan dengan standar internasional);
5. Evolusi dalam posisi sebagai organisasi audit internal (karena kurangnya budaya pengendalian internal dan audit di peradilan) menuju posisi auditor eksternal (sejak reformasi peradilan membentuk manajemen otonom).

Berikut contoh-contoh audit terbaru yang dilakukan oleh komisi ini:

1. Audit terhadap 13 pengadilan tingkat pertama tentang kebijakan manajemen sumber daya manusia mereka pada 2018;
2. Audit pengawasan administrasi orang-orang yang rentan pada 2019, tindak lanjut pada 2022;
3. Audit evaluasi hakim di pengadilan perusahaan pada 2021;
4. Audit manajemen krisis covid-19 oleh 13 pengadilan tingkat pertama, kantor kejaksaan dan perguruan tinggi pada 2021;
5. Audit pengadilan banding di Brussels pada 2022.

Penyelidikan Khusus (U-AIC)

Komisi berbahasa Perancis dan Belanda dapat melakukan penyelidikan khusus terhadap hakim. Penyelidikan khusus ini dilakukan:

1. Dengan mengesampingkan kompetensi pidana dan disipliner, HCJ dapat memulai penyelidikan khusus dan menyelidiki kasus-kasus tertentu;
2. Sebagian besar ketika kepercayaan publik dipertaruhkan karena dugaan tidak berfungsinya bagian dari peradilan;
3. Penyelidikan ini dimulai secara otomatis atau atas permintaan Menteri Kehakiman, atau atas permintaan mayoritas anggota DPR atau Senat.

Tujuan dilaksanakannya penyelidikan khusus adalah untuk mengidentifikasi kemungkinan disfungsi struktural dan merumuskan rekomendasi untuk memperbaiki sistem.

Dalam mengupayakan perwujudan dari tujuan tersebut, tim investigasi komisi ini dapat:

1. Mengunjungi pengadilan dan kantor kejaksaan;
2. Berkonsultasi (dan membuat salinan) catatan pengadilan;
3. Mendengar individu-individu (bahkan di bawah sumpah) - kerahasiaan atau kerahasiaan profesional bisa dilanggar.

Berikut 2 (dua) contoh kasus terbaru yang diinvestigasi oleh komisi ini:

1. Kasus (pada saat itu diduga) pembunuh (sebelumnya pemerkosa yang dihukum), Julie Van Espen, pada 2019, tindak lanjut pada 2022;
2. Kasus Josef Chovanec yang meninggal tak lama setelah intervensi polisi di bandara selatan Brussels pada 2020.

Etika Hakim



Suasana Pertemuan antara Delegasi KY RI dan HCJ Belgia

Brussel, 25 Oktober 2022

Pada 2012, etika hakim disusun dan diterbitkan oleh HCJ bekerja sama dengan *Advisory Council of the Judiciary* (ACJ)/Dewan Penasihat Kehakiman. Etika ini merupakan panduan positif ketika para hakim menghadapi situasi tertentu, mengingat nilai-nilai esensial dan kualitas yang diperlukan untuk menjalankan profesinya. Di samping sebagai panduan, etika hakim juga dianggap sebagai sebuah ringkasan yang tidak boleh disamakan dengan kode disiplin. Artinya antara etika dan kode disiplin itu berbeda.

Meski etika dan kode disiplin itu berbeda, namun keduanya tetap mempunyai korelasi. Korelasi antara etika dan disiplin dapat dilihat dalam Pasal 404 Kode Yudisial (*article 404 of the Judicial Code*), “*as regards the members of the judiciary referred to in Article 305: the duties of their charge, the dignity of its nature and the tasks of their charge are interpreted in particular in the light of general ethical principles*” in the context of possible disciplinary sanctions. Terjemahannya, “sehubungan dengan anggota peradilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 305: tugas-tugas yang menjadi tanggung jawab mereka, martabat dan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawab mereka ditafsirkan secara khusus dalam prinsip-prinsip etika umum” dalam konteks kemungkinan sanksi disipliner.

Seleksi Calon Hakim Agung dan Keamanan Hakim



Kadafi terlihat sedang menyampaikan pertanyaan kepada Tim HCJ

Brussel, 25 Oktober 2022

Dalam pertemuan antara KY RI dan HCJ Belgia, perwakilan delegasi KY, Kadafi, menyampaikan 3 (tiga) hal dari wewenang dan tugas KY. *Pertama*, seleksi calon hakim agung. Poin dari paparan ini adalah *talent scouting*, cara KY untuk memperoleh hakim-hakim tinggi yang potensial menjadi calon hakim agung. Berikutnya adalah proses seleksi, terutama hubungan KY dengan lembaga lain dalam pelaksanaan seleksi calon hakim agung. *Kedua*, adalah berkaitan kesejahteraan hakim. “KY juga mempunyai tugas mengupayakan kesejahteraan hakim. Aturan terakhir untuk hal ini dibentuk pada 2012. Dikarenakan hal tersebut, KY berupaya untuk mendorong revisi peraturan tersebut agar ada perbaikan kesejahteraan hakim”, kata Kadafi. *Ketiga*, advokasi hakim. Contoh kasus yang disampaikan oleh Kadafi adalah teror dan vandalisme ke Majelis Hakim, membuat gaduh atau keributan di persidangan baik masyarakat awam maupun oleh tokoh masyarakat.

Berkaitan dengan keamanan hakim, Dresser menceritakan sekitar 10 tahun yang lalu, wacana keamanan hakim dan pengadilan belum menjadi perhatian. “Ketika itu saya pernah mengalami ancaman dari geng motor terkait dengan kasus yang saya tangani saat menjadi hakim. Situasi saat itu sangat mencekam, hingga akhirnya polisi harus melakukan pengecekan keamanan selama 24 jam di sekitar kediaman saya”, cerita Dresser. “Sebelumnya juga pernah ada kasus pembunuhan hakim yang menjadi korban dari kasus yang sedang ditangani”, tambah Dresser.

Dresser mengakui ketiadaan sistem pengamanan membuat hal ini dapat terjadi. Apalagi karena saat itu semua orang dapat mengunjungi pengadilan dan tidak ada kontrol atau pengamanan. Meskipun begitu, hal baiknya adalah pasca kejadian tersebut, wacana keamanan hakim dan pengadilan kemudian menjadi poin penting untuk dibahas dan ditindaklanjuti.

Menanggapi penjelasan dari Dresser, Kadafi kemudian bertanya, “apakah HCJ mempunyai tanggung jawab atas keamanan hakim dan pengadilan”, tanya Kadafi. “Itu bukan tanggungjawab kami, melainkan tanggung jawab Ketua MA dan pihak keamanan (polisi) di Belgia”, jawab Dresser.



Paparan *Institut voor Gerechtelijke Opleiding (IGO)/ Institut de Formation Judiciaire (IFJ)*

Brussel, Pada 25 Oktober 2022

Kunjungan kedua delegasi KY adalah ke *Institut voor Gerechtelijke Opleiding (IGO)* atau Lembaga Pelatihan Yudisial. Dalam pertemuan ini delegasi KY bertemu dan berdiskusi perihal pelatihan hakim dengan Direktur IGO, Raf Van Ransbeeck.

Sejarah Singkat IGO

IGO merupakan lembaga independen yang dapat dikatakan masih relatif muda di Belgia. Dibentuk pada 31 Januari 2007 dan mulai beroperasi pada 1 Januari 2009.

Sebelum lembaga yang kompetensi atau tugasnya melakukan pelatihan kepada *magistrates* (hakim-hakim), jaksa, dan pegawai pengadilan ini dibentuk, pelatihan terhadap hakim dan jaksa dilakukan oleh kementerian atau eksekutif. Pelatihan-pelatihan oleh kementerian tersebut dilakukan sejak awal 1990 hingga terbentuknya IGO, pada 2007.

IGO pertama kali mulai melaksanakan pelatihan pada September 2009. Hingga 2019, IGO tercatat telah melakukan pelatihan terhadap 16.000 para hakim, jaksa, dan pegawai pengadilan.

Pada 2019, melalui perubahan *the Potpurri* undang-undang yang menjadi dasar hukum IGO, IGO diberikan tugas baru, yaitu sebagai lembaga pusat pengetahuan dan dokumentasi hukum.

Struktur IGO

Secara kelembagaan IGO memiliki beberapa bagian. *Pertama*, adalah Dewan Direksi. Dewan ini terdiri atas satu orang direktur dan satu orang wakil direktur. Kenapa seperti ini susunannya? Karena sebagaimana Belgia yang terdiri atas beberapa bahasa, Belanda, Jerman, dan Prancis, IGO dalam rangka mengakomodir itu juga membuat direksi yang orang-orangnya mewakili ketiga bahasa tersebut. Direktur IGO, Raf Van Ransbeeck merupakan orang Belanda, kemudian wakilnya adalah orang yang berbahasa Prancis.

Tugas-tugas dari Dewan Direksi ini adalah sebagai penanggung jawab atas semua kegiatan IGO. Tanggung jawab di sini tidak hanya sebagai penanggungjawab pelaksanaan pelatihan, tapi juga strategi atas perencanaan dan koordinasi dengan pemerintah berkaitan dengan rencana penganggaran IGO/H CJ. Masa kerja dari dewan direksi adalah enam tahun.

Proses seleksi dari Dewan Direksi dilakukan oleh HCJ. HCJ mengawalinya dengan membuka lowongan dengan mempublikasikannya secara umum. Kemudian orang-orang yang tertarik akan mendaftar dan setiap calon akan menyampaikan alasan atau motivasi ingin menjadi bagian Dewan Direksi IGO kepada HCJ. Dari hasil mendengarkan motivasi tadi, HCJ selanjutnya membuat saran atau rekomendasi untuk disampaikan ke pemerintah. Atas rekomendasi HCJ tadi, pemerintah dapat menetapkan atau tidak. Rekomendasi HCJ ini bersifat tidak mengikat. Meskipun tidak mengikat, dalam praktiknya, selama ini belum pernah pemerintah menolak apa yang HCJ rekomendasikan.

Kedua, strukturnya adalah Dewan Pelaksana. Dewan ini terdiri atas perwakilan dari jaksa, hakim kasasi, pegawai pengadilan, komunitas bahasa Belanda dan bahasa Prancis, HCJ, kementerian kehakiman, dua menteri pemerintah, yang salah satunya adalah menteri yang mengurus anggaran. Meskipun terlihat ada unsur pemerintah, bukan berarti IGO tidak independen. Lembaga ini tetap independen, meski strukturnya terdapat dari perwakilan institusi lain.

Ketiga, adalah Komisi Ilmiah. Komisi yang terdiri dari perwakilan hakim, jaksa, kampus, BAR (advokat), Perpustakaan Nasional, Institusi Administrasi Pelatihan ini bertanggungjawab melakukan penyusunan program-program pelatihan dan melaksanakan program-program itu.

Terakhir atau *keempat* adalah Komisi Evaluasi Pelatihan. Komisi ini terdiri dari satu orang hakim, satu orang jaksa, dua orang ahli psikologis yang merupakan perwakilan Bahasa Belanda dan Bahasa Prancis. Tugas dari komisi ini adalah melakukan evaluasi pelatihan dan peserta pelatihan. Maksudnya adalah evaluasi pelaksanaan pelatihan, dan keikutsertaan serta hasil pelatihan peserta pelatihan.

Kedudukan

IGO merupakan lembaga yang independen. IGO bukan bagian dari Kementerian Kehakiman yang notabene adalah pemberi anggaran atas setiap pelaksanaan kegiatan-kegiatan IGO. Di samping itu, IGO juga bukan bagian dari HCJ, Pengadilan Banding, dan Kejaksaan. Jadi pelatihan hakim itu dilaksanakan oleh IGO, yang memang kelembagaannya diisi dari perwakilan institusi dan komunitas, yang kedudukannya tetap independen. Ini yang disebut "*parasatal sui generis*".

Tugas dan Anggaran



Suasana Direktur IGO Ransbeeck menjelaskan paparannya di depan delegasi KY RI

Brussel, Pada 25 Oktober 2022

Tugas

Tugas dari IGO adalah melakukan pelatihan untuk *magistrates*, *judicial trainees* (hakim baru), dan pegawai pengadilan. Dalam melaksanakan tugasnya tersebut, terdapat beberapa jenis pelatihan yang telah dikembangkan oleh IGO, di antaranya:

1. Pelatihan berkelanjutan untuk hakim dan jaksa. Jumlah jam pelatihan yang harus diikuti oleh hakim dan jaksa pada pelaksanaan pelatihan ini adalah 30 jam/tahun.
2. Pelatihan untuk *judicial trainees* (*future magistrates*). Pelatihan yang dilaksanakan selama 2 tahun ini wajib untuk diikuti oleh peserta yang ingin menjadi hakim.
3. Pelatihan untuk pegawai atau aparat pengadilan. Layaknya pelatihan untuk hakim dan jaksa, IGO juga mengembangkan pelatihan berkelanjutan untuk pegawai pengadilan.

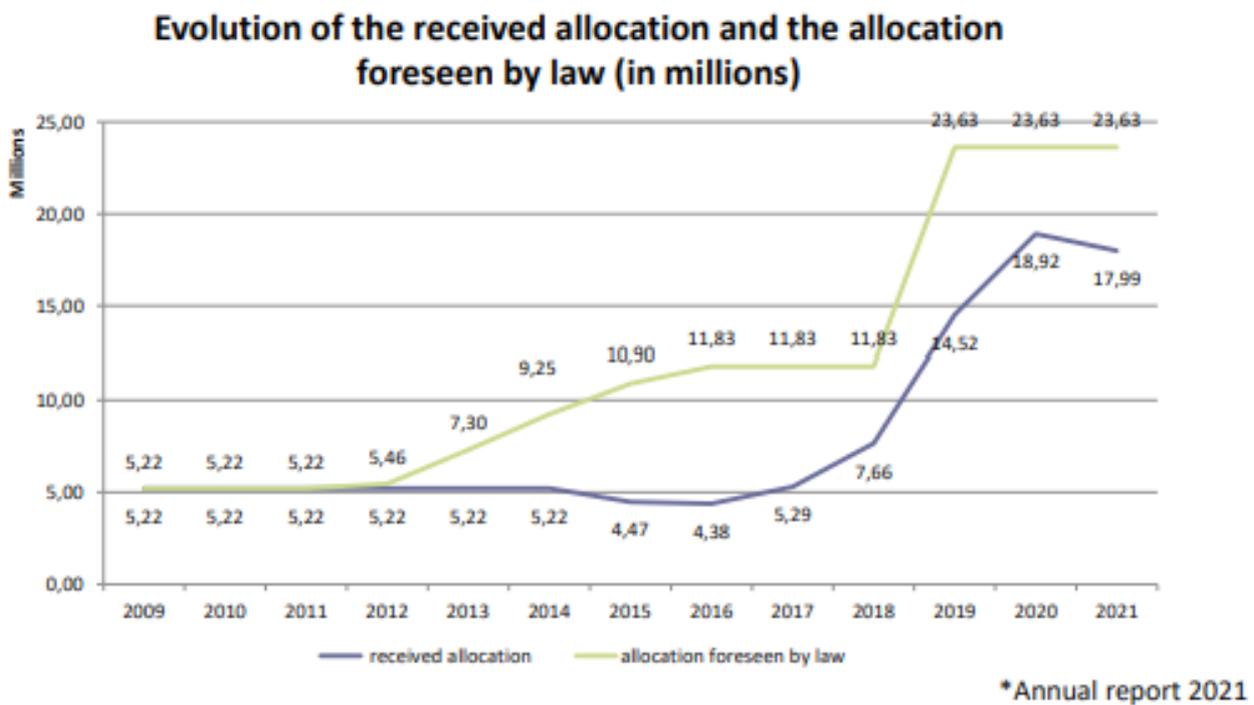
Jumlah Hakim dan Jaksa Di Belgia

Di Belgia, jumlah profesional atau *magistrates*nya ada 2.400 orang, yang terdiri atas 1.000 orang berprofesi jaksa, dan 1.400 orang berprofesi hakim. Selain hakim karir, di Belgia juga terdapat hakim *ad hoc* yang berasal dari profesi advokat, notaris, dan akademisi. Hakim-hakim *ad hoc* di Belgia akan bersama-sama dengan hakim karir dalam menangani perkara-perkara tertentu, seperti perburuhan, niaga, dan lain-lain.

Anggaran yang diberikan oleh pemerintah kepada IGO setiap tahunnya tidak pernah sama. Kadang pada tahun berjalan IGO memperoleh anggaran yang lebih tinggi dari tahun sebelumnya, begitu juga sebaliknya.

Sementara itu untuk perencanaan dan alokasi yang diterima, sangat jarang IGO memperoleh anggaran yang sama dengan yang IGO rencanakan. Jadi IGO beberapa kali memperoleh anggaran yang lebih kecil dari yang direncanakan. Yang menjadi dasar pemerintah tidak memberikan IGO anggaran sebagaimana direncanakan, karena kondisi negara yang mengalami krisis.

Penjelasan di atas dapat kita lihat pada gambar di bawah ini:



Sumber: Paparan IGO

Di samping kedua penjelasan di atas, hal lain yang menarik diketahui adalah adanya peningkatan anggaran yang signifikan diberikan pemerintah kepada IGO dari 2018 ke 2019 (lihat garis biru). Pada 2018, pemerintah Belgia hanya mengalokasikan anggaran sebesar 7,66 Juta Euro kepada IGO, sementara pada 2019 mengalami peningkatan signifikan, sekitar 6,86 Juta Euro atau menjadi 14,52 Juta Euro.

Peningkatan itu terjadi karena pemerintah memberikan tambahan anggaran untuk pelaksanaan tugas baru IGO, yaitu sebagai pusat pengetahuan, dan dokumentasi. Dari anggaran tersebut, pemerintah belgia berharap dari IGO dapat menjadi pusat data putusan hakim dan buku-buku digital.

Untuk putusan hakim, sebagai pusat datanya, data-data yang IGO kumpulkan tidak digunakan sebagai konsumsi publik. Data-data tersebut hanya bisa diakses oleh jaksa, hakim, dan pemerintah, dalam hal ini kementerian kehakiman.

Ruang Lingkup dan Metode Pelatihan



Delegasi KY RI mendengarkan dengan seksama paparan dari Direktur IGO Ransbeeck

Brussel, 25 Oktober 2022

Ruang Lingkup Pelatihan

Dalam melaksanakan atau mengorganisasikan pelatihan, IGO fokus pada kompetensi teknis atau yudisial, kompetensi administrasi atau *organizational competence*, dan kompetensi sosial atau komunikasi.

Untuk kompetensi teknis, materi pelatihannya berkaitan dengan aspek prosedural dan interpretasi atas hukum perdata (keluarga) dan pidana. Di samping itu, IGO juga memberikan pelatihan yang metode pelaksanaannya adalah peserta seakan langsung melakukan praktek atas materi-materi yang diperoleh.

Berikutnya, untuk kompetensi administrasi, IGO memberikan banyak materi kepada peserta pelatihan. Materi-materi yang dimaksud di antaranya, manajemen waktu, manajemen stres, perubahan manajemen, manajemen proyek, proses bisnis, kepemimpinan, asesmen terhadap beban kerja, dan lainnya.

Jenis-jenis pelatihan yang diberikan oleh IGO untuk peningkatan kompetensi komunikasi atau sosial adalah pelatihan tentang kedudukan atau posisi hakim, serta bagaimana mengelola sidang. Pelatihan tentang bagaimana mengadili sidang dilakukan dengan praktek peradilan semu. Selanjutnya ada juga pelatihan kode etik hakim yang di Belgia disebut *deontology training*.

Pelatihan Deontologi

Pelatihan ini merupakan pelatihan baru yang dilaksanakan oleh IGO. Pelatihan ini pertama kali dilaksanakan pada 2020. Target peserta pelatihan ini adalah hakim dan jaksa yang baru diangkat atau ditetapkan sejak Januari 2020.

Tujuan IGO mengembangkan pelatihan adalah untuk memberikan gambaran konkrit tentang hak, kewajiban, dan tugas seorang hakim berdasarkan aturan nasional dan internasional. Dengan tujuan seperti itu, maka materi yang diajarkan pada pelatihan ini adalah:

1. Independensi dan ketidakberpihakan;
2. Integritas;
3. Kerahasiaan dan kebijaksanaan profesional;
4. Loyalitas;
5. Perilaku pribadi;
6. Penjelasan masalah-masalah praktis, seperti partisipasi dalam komunitas sosial, dan keterlibatan dalam organisasi non-profesional lainnya.

Di samping pelatihan deontologi yang punya kaitan dengan kode etik hakim, IGO juga mengembangkan pelatihan disiplin. Pelatihan yang hanya dapat diikuti oleh jaksa, ketua pengadilan, dan hakim-hakim yang diberi tugas melakukan penindakan disiplin ini, dilaksanakan tidak hanya menyampaikan teori, melainkan juga memberikan contoh-contoh kasus. Jadi pelatihannya berbentuk studi kasus.

Tujuan dilaksanakannya pelatihan disipliner ini adalah agar peserta pelatihan dapat mengelola dengan baik prosedur pendisiplinan. Dengan tujuan seperti itu, maka wawasan atau materi yang diberikan adalah:

1. Prinsip-prinsip hukum;
2. Tindakan disipliner;
3. Hubungan antara hukum dengan tindakan disipliner;
4. Penjelasan tentang komposisi pengadilan disipliner.

Di Belgia, hukuman disiplin hakim hanya dapat diberikan oleh Mahkamah Agung. Hukuman yang diberikan oleh hakim yang melakukan pelanggaran disiplin tidak serta merta langsung dihukum, tapi juga harus melalui proses di pengadilan disiplin. Pengadilan disiplin di sini hanya dilakukan oleh lembaga yudisial.

Metode Pelatihan

Di tengah kondisi pandemi Covid-19, IGO melaksanakan pelatihannya dengan webinar (*online*), *hybrid*, dan tatap muka. Pada 2020, 50% pelatihan dilaksanakan secara webinar dan *hybrid*, serta 50% lagi dilaksanakan secara tatap muka. Untuk pelatihan yang dilaksanakan secara tatap muka, IGO melaksanakan beberapa metode pelatihan, seperti *classical*, *coaching*, analisis situasional, simulasi,

intervensi, *workpalce training*, dan *mobile PC class*. Di samping metode-metode pelatihan tersebut, IGO juga melaksanakan *exchange courses*, *e-learning* dan *live streaming*.

Sebelum 2010, tepatnya pada 2009 awal mula IGO melaksanakan pelatihan, pelatihan hanya dilaksanakan secara klasikal. Kemudian di 2010 mengalami perbaikan dengan tambahan beberapa metode, seperti klasikal, *coaching*, analisis situasional, simulasi, dan intervensi.

Satu hal yang menarik dari metode pelatihan yang dilakukan oleh IGO, ternyata sejak 2017 IGO telah mengembangkan dan melaksanakan pelatihan secara digital atau penggunaan komputer. Metode-metode pelatihan yang dimaksud adalah *e-learning*, *live streaming*, dan *mobile pc class*.

Penjelasan lebih lengkap mengenai metode pelatihan digunakan oleh IGO dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Focus on new training methods

| Training method* | Before 2010 | 2010 | 2013 | 2017 | 2020 |
|-------------------------------|-------------|------|------|------|------|
| Classical training (in group) | X | X | X | X | X |
| Coaching | | X | X | X | X |
| Situational analysis | | X | X | X | X |
| Simulations | | X | X | X | X |
| Intervision | | X | X | X | X |
| Workplace learning | | | X | X | X |
| Exchange courses | | | X | X | X |
| Elearning | | | | X | X |
| Livestreaming | | | | X | X |
| Mobile PC class | | | | X | X |
| Webinars | | | | | X |
| Hybrid courses | | | | | X |

*This list is not exhaustive

Sumber: Paparan IGO

Perpustakaan Digital dan Moodle

Pelatihan-pelatihan yang dilakukan secara *e-learning* dan *live streaming* dapat diakses oleh setiap peserta pelatihan melalui perpustakaan digital. Di samping itu, perpustakaan digital yang IGO telah bangun juga dapat digunakan untuk mengakses atau mencari dokumentasi setiap pelatihan, termasuk rekaman pelatihan, dan sebagainya. Dokumentasi di sini adalah berupa materi pelatihan, termasuk juga buku-buku digital yang peserta butuhkan, yang berkaitan dengan tema pelatihan.

Cara Menentukan Jenis Pelatihan dan Evaluasi Pelatihan



Pemberian Cenderamata Delegasi KY RI oleh Wakil Ketua M. Taufiq HZ kepada Direktur IGO Ransbeeck

Brussel, 25 Oktober 2022

Cara Mengetahui Kebutuhan Pelatihan

Setiap tahunnya IGO mengirimkan “sebuah mangkuk”, informasi tiga kebutuhan pelatihan hakim. Dalam informasi tersebut, para target peserta pelatihan dapat memilih atau menyampaikan tiga kebutuhan pelatihan. Terdapat sekitar 20% peserta yang setiap tahunnya secara stabil memberikan respon mengenai kebutuhan pelatihan mereka.

Di samping cara seperti itu, Komisi Ilmiah IGO juga melakukan evaluasi jenis dan pelaksanaan pelatihan. Tidak hanya evaluasi, komisi itu dan Dewan Pelaksana akan bersama-sama mengundang kelompok atau komunitas kecil tertentu untuk bersama-sama IGO melakukan identifikasi kebutuhan pelatihan hakim, jaksa, dan pegawai pengadilan.

Jadi cara IGO menentukan atau mengidentifikasi pelatihan-pelatihan yang dibutuhkan oleh hakim dan jaksa adalah:

1. Membuat survei kebutuhan pelatihan;
2. FGD di antara pengurus Komisi Ilmiah IGO sebagai hasil evaluasi pelatihan;
3. FGD dengan kelompok atau komunitas, yang biasanya mengundang kelompok komunitas berbahasa Belanda dan Perancis.

Memilih Pelatihan

Setiap bulannya, IGO menyampaikan jenis-jenis pelatihan yang akan dilaksanakan di *website*. Jenis-jenis pelatihan yang dipublikasikan tidak hanya berisi teknis pelaksanaannya, tapi juga gambaran umum dari pelatihan tersebut. Dengan informasi seperti itu, peserta pelatihan dapat memilih jenis pelatihan yang ingin mereka ikuti.

Evaluasi Pelatihan

Dalam melakukan evaluasi pelatihan, IGO mengadopsi teori Kirkpatrick. Pada teori tersebut terdapat empat tingkat evaluasi, yaitu:

1. Reaksi (*reaction*);
2. Pembelajaran (*learning*);
3. Perilaku (*behavior*);
4. Hasil (*result*).

Dari keempat tingkatan itu, kata Ransbeeck, IGO baru menggunakan tingkatan pertama yaitu reaksi sebagai dasar melakukan evaluasi pelatihan.

Kemudian secara teknis, IGO melaksanakan evaluasi dengan memberikan tautan *link* yang berisi isian evaluasi kepada peserta pelatihan. Tautan baru akan disampaikan ke peserta ketika pelatihan telah selesai dilaksanakan. Secara umum yang IGO ingin ketahui dalam tautan tersebut adalah pendapat mereka mengenai pelatih atau narasumber, dan poin atau hal apa saja yang masih perlu ditingkatkan.

Kemudian masih berkaitan dengan evaluasi pelatihan, di akhir sesi pertemuan dengan IGO, Anggota KY Binzid Kadafi bertanya mengenai kepuasan publik terhadap kinerja peradilan. “Apakah ada yang kemudian mengorelasikan tugas-tugas IGO sebagai lembaga pelatihan hakim dengan kinerja peradilan? Di Indonesia hal ini biasa terjadi. Hal ini dikarenakan sebagaimana undang-undang kami memiliki tugas meningkatkan kapasitas hakim, termasuk juga melakukan *deontology training* atau pelatihan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim”, tanya Kadafi.

“Faktanya di Belgia, penilaian terhadap efektivitas peradilan bukan menjadi kewenangan IGO. Hal ini merupakan kewenangan dari lembaga peradilan. Oleh karena itu, hasil survei seperti ini tidak disampaikan ke IGO, tapi ke lembaga peradilan. Meski demikian, IGO tetap menjadikan hasil survei sebagai bagian pembelajaran untuk memperbaiki mekanisme pelaksanaan pelatihan hakim”, tutup Ransbeeck.



Suasana pertemuan delegasi KY dengan ENCJ

Brussel, 26 Oktober 2022

Hari kedua di Belgia, delegasi KY berkunjung ke *European Networks of Councils for the Judiciary* (ENCJ). Delegasi KY diterima oleh Monique van der Goes selaku Direktur dan Aleksandra Switalska selaku *policy officer*, yang menjelaskan tugas, fungsi dan peran *ENCJ* secara rinci.

Awal terbentuk ENCJ

Di awal 2000 bermunculan dewan yudisial (KY) di berbagai negara di Eropa. Sebut saja Dewan Yudisial Belanda pada 2002, HCJ Belgia pada 2000-an, begitu juga Irlandia di awal 2000. Karena semuanya merupakan lembaga yang baru dibentuk, muncul pemikiran untuk saling belajar dari satu sama lain. Keinginan tersebut memunculkan ide dari masing-masing lembaga untuk membentuk suatu organisasi bersama sebagai jaringan dari Dewan Yudisial di negara-negara Uni Eropa, yang disebut *European Networks of Councils for the Judiciary* (ENCJ).

ENCJ secara resmi berdiri pada 2004, namun butuh waktu beberapa tahun sampai akhirnya Dewan Yudisial dari berbagai negara Uni Eropa memulai kerja sama dengan ENCJ.

Pada mulanya ENCJ dibentuk secara informal. Berbentuk sebuah jaringan, ENCJ memiliki piagam kesepakatan, mengadakan pertemuan setahun sekali di Majelis Umum (*General Assembly*), dan memiliki Dewan Pengurus (*Executive Board*) sebagai dasar. Dalam perkembangannya, ENCJ membutuhkan dana untuk menjalankan tugas dan fungsinya. Sejak 2008, ENCJ mendapatkan

anggaran rutin dari Komisi Eropa dan pada 2009 ENCJ memiliki kantor permanen di Brussels setelah sebelumnya berada di kantor Dewan Yudisial Belanda.

Anggota ENCJ

Saat ini, ENCJ memiliki 21 negara anggota. Anggota menurut Anggaran Dasar terdiri dari lembaga-lembaga nasional di berbagai negara anggota Uni Eropa, yang independen dari kekuasaan eksekutif dan legislatif, dan yang bertanggung jawab untuk mendukung peradilan yang independen dalam memberikan keadilan (Pasal 6 Anggaran Dasar).

Terdapat tiga model keputusan oleh dewan yudisial anggota ENCJ, yaitu:

1. Model bagian selatan Eropa, seperti Italia dan Portugal dimana keputusan dewan yudisialnya terkait sumber daya manusia seperti pemilihan, promosi, dan pengawasan kode etik hakim;
2. Model di bagian utara Eropa, terkait administrasi pengadilan, kompetensi manajemen finansial peradilan, pemilihan Ketua Pengadilan;
3. Model beberapa negara lainnya di bagian Timur Eropa merupakan kombinasi dari kedua model tersebut misalnya terkait seleksi hakim dan kompetensi finansial pengadilan.

Pada 2021, ENCJ mengeluarkan Polandia karena memiliki masalah dengan pemerintahan negaranya, dimana independensi dari peradilan tidak mendapat perlindungan.

Terkait dengan hal ini, anggota KY Amzulian Rifai melontarkan pertanyaan, “bagaimana ENCJ mengukur bahwa Polandia tidak mendukung independensi peradilan? Apakah ENCJ melakukan penyelidikan akan hal tersebut?”. Hal ini dijawab oleh Monique, “Kami memiliki kontak dengan persatuan hakim, media juga sangat terbuka di Eropa termasuk melalui twitter, laporan dari Komisi Uni Eropa, laporan dari LSM” terangnya.

Dilanjutkan dengan pertanyaan Amzulian Rifai “Siapa yang membuat keputusan tersebut?” yang dijawab kembali oleh Monique, “Majelis Umum (*General Assembly*). Kekuasaan penuh ENCJ terletak di Majelis Umum (*General Assembly*). Prosesnya sangat rumit karena seperti ada isu politik di dalam proses tersebut dan beberapa anggota keberatan dengan hal tersebut. Tetapi ENCJ harus menjaga kredibilitas dan independensi peradilan dan peran mempertahankan independensi peradilan di antara negara anggota ENCJ. Keputusan tersebut diambil melalui proses voting yang sebelumnya telah diajukan dan dipresentasikan oleh Dewan Eksekutif ke Majelis Umum (*General Assembly*). Dewan juga diundang beberapa kali oleh Polandia untuk menjelaskan dan mempertahankan posisi mereka. Votingnya bersifat anonim, kami memperpanjang proses voting, tetapi tidak ada negara anggota yang menolak. Dalam mempersiapkan pengambilan keputusan, kami melakukan banyak diskusi dan tidak ingin ketika sudah berada di Majelis Umum (*General Assembly*), kami tidak memperoleh voting” terangnya.

Monique menambahkan kemungkinan Polandia dapat diterima kembali menjadi anggota, dengan syarat Polandia berubah dan menunjukkan bahwa mereka mempertahankan independensi peradilan.

Struktur ENCJ

ENCJ memiliki 2 (dua) organ yaitu:

1. Majelis Umum (*General Assembly*);
Majelis umum mengadakan pertemuan setahun sekali. Selain pertemuan rutin yang setahun sekali tersebut dapat mengadakan pertemuan luar biasa majelis umum jika dibutuhkan. Anggota ENCJ memiliki hak voting dalam majelis umum.
2. Dewan Pengurus (*Executive Board*)
Dewan pengurus dipilih 2 tahun sekali dan terdiri dari 7 anggota (7 institusi) dan 1 Presiden. Tugasnya mengelola asosiasi di antara pertemuan majelis umum (*General Assembly*). Dewan Pengurus melakukan pertemuan 4-5 kali setahun dan memiliki jadwal kontak rutin melalui email dan *whatsapp*.

Tujuan Pembentukan ENCJ

European Networks of Councils for the Judiciary merupakan lembaga yang dibentuk untuk meningkatkan kerjasama pemahaman yang mutual di antara dewan yudisial, dan anggota peradilan baik dari negara anggota Uni Eropa dan dari calon negara anggota Uni Eropa. Di samping itu, masih terdapat alasan-alasan dibentuknya ENCJ, di antaranya:

1. Sebuah badan yang mewakili perspektif yudisial untuk Institusi Eropa;
2. Menghubungkan lembaga peradilan di seluruh Eropa;
3. Dukungan utama untuk Dewan Independen untuk Kehakiman dalam misi mereka untuk mempromosikan dan melestarikan peradilan yang mandiri, akuntabel, dan berkualitas.

ENCJ di masa Jabatan 2022-2025



Monique van der Goes menjelaskan cara bekerja ENCJ masa jabatan 2022-2025

Brussel, 26 Oktober 2022

Komisioner atau pimpinan ENCJ dalam satu periode bekerja cukup singkat. Biasanya sekitar 4 sampai dengan 5 tahun. Dengan masa kerja yang singkat itu, setiap komisioner diminta untuk memiliki rencana multi tahunan agar fokus pada tema tertentu.

Dalam menyusun rencana kerja tahunan ENCJ, Majelis Umum akan melakukan pertemuan sekali setahun. Pertemuan tahunan ini akan membahas topik-topik yang telah disiapkan oleh anggota dan dewan, yang akan dikerjakan pada bulan September sampai dengan Juni tahun berikutnya.

Tujuan Strategis ENCJ Tahun 2022-2025

Untuk masa jabatan 2022-2025, ENCJ menyusun 3 (tiga) poin tujuan strategis. Ketiga poin tujuan strategis tersebut adalah:

1. Untuk melindungi dan mempromosikan *Rule of Law* dengan memberikan dukungan terhadap independensi, akuntabilitas, dan kualitas peradilan di Eropa dan mempromosikan pemahaman dan penghormatan terhadap independensi peradilan;
2. Memperkuat rasa saling percaya di antara peradilan di Eropa;
3. Mempromosikan akses yang efektif terhadap peradilan di masa digital.

Ketika menjelaskan ketiga tujuan strategis tersebut, salah satu delegasi KY, yaitu Amzulian Rifai menanyakan mengenai bentuk dari tujuan strategis kedua. Pertanyaan tersebut kemudian dijawab dengan menyampaikan, “ketika negara anggota ENCJ melakukan pertemuan untuk bertukar informasi dan pengalaman, hal ini sudah memberikan kontribusi dalam memperkuat rasa saling percaya. Isu paling besar ada di negara yang tingkat korupsinya tinggi. Contoh di Slovakia selama 2-3 tahun terakhir hakim termasuk hakim agung juga ditangkap karena kasus korupsi,” jawab Monique.

ENCJ mempromosikan *Rule of Law* dan Independensi Peradilan



Monique van der Goes sedang menyampaikan paparannya perihal ENCJ yang terus menyuarakan *rule of law*, dan independensi peradilan

Brussel, 26 Oktober 2022

ENCJ fokus pada isu independensi dan akuntabilitas peradilan. Dalam melaksanakan kegiatannya, ENCJ selalu menyuarakan *rule of law*, dan independensi peradilan itu sendiri. Dalam melakukan hal tersebut, ENCJ terus:

1. Bekerja sama dengan Komisi Eropa khususnya dengan *Justice Scoreboard* Uni Eropa tentang pelaporan terkait *Rule of Law* pada negara-negara tertentu;
2. Memperkuat *Rule of Law* dan Peradilan melalui pernyataan dan advokasi di Brussels;
3. Mendukung Dewan Yudisial/peradilan di semua negara anggota Dewan Yudisial Uni Eropa;

4. Menetapkan standar minimum dan mempromosikan praktik-praktik terbaik (Kompodium ENCJ tentang Dewan Yudisial); dan
5. Mempromosikan peningkatan Independensi dan akuntabilitas peradilan nasional.

Di luar kegiatan-kegiatan yang disebutkan di atas, ENCJ juga setiap tahunnya melakukan deklarasi. Tercatat sejak 2008 sampai 2022 ini, dalam setahun pasti ENCJ melakukan deklarasi dan resolusi. Namun karena pandemi, pada 2020 ENCJ sama sekali tidak melakukan kegiatan deklarasi dan resolusi. Berikut jenis-jenis deklarasi dan resolusi yang dilakukan ENCJ dari 2008 sampai dengan 2022:

1. Resolusi Budapest tentang Tata Kelola Mandiri Peradilan: Menyeimbangkan Independensi dan Akuntabilitas (2008);
2. Resolusi Bukares tentang Transparansi dan Akses ke Keadilan (2009);
3. Deklarasi London tentang Etika Peradilan (2010);
4. Deklarasi Vilnius Tentang Tantangan dan Peluang bagi Peradilan dalam Iklim Ekonomi saat ini (2011);
5. Deklarasi Dublin tentang Standar untuk Perekrutan dan Pengangkatan Anggota Peradilan (2012);
6. Deklarasi Sofia tentang Independensi dan Akuntabilitas Peradilan (2013);
7. Deklarasi Roma tentang Peran ENCJ (2014);
8. Deklarasi Den Haag tentang Mempromosikan Sistem Peradilan yang Efektif (2015);
9. Deklarasi Warsawa tentang Masa Depan Keadilan Di Eropa (2016);
10. Deklarasi Paris tentang Resiliensi Peradilan (2017);
11. Deklarasi Lisbon tentang memimpin perubahan positif (2018);
12. Manifesto Bratislava untuk Lembaga Eropa baru (2019);
13. Majelis Umum Luar Biasa di Vilnius (2021);
14. Kompodium tentang Dewan Yudisial (Sidang Umum Luar Biasa di Vilnius, 2021);
15. Deklarasi Athena tentang Solidaritas Yudisial pada saat krisis (2022).

Deklarasi dan resolusi ini merupakan upaya dari ENCJ untuk menetapkan standar minimal dan rekomendasi yang dapat dijalankan oleh anggota ENCJ. Namun, karena masing-masing anggota berbeda satu sama lain, ENCJ fokus untuk menghasilkan keseimbangan dan landasan umum untuk menghargai seluruh sistem yang ada dan dapat menjadi standar yang seragam.

Proyek Independensi dan Akuntabilitas ENCJ



Kiri ke Kanan: Dini Wahyuni, Anggi Quartri Sitohang, Aleksandra Switalska, Monique van der Goes, M. Taufiq HZ, Amzulian Rifa'I, Binziad Kadafi, Ikhsan Azhar, Agus Susanto

Brussel, 26 Oktober 2022

Proyek independensi dan akuntabilitas merupakan proyek utama ENCJ untuk mengukur tingkat independensi dan akuntabilitas sistem peradilan, yang dalam hal ini sangat tergantung pada jaminan terhadap kedua prinsip tersebut. ENCJ memiliki sistem penilaian untuk melihat tantangan terhadap independensi dan akuntabilitas yang dialami oleh negara anggota. Terhadap tantangan tersebut, dilakukan diskusi bersama untuk mencari solusi bagi permasalahan negara anggota.

Proyek ini dimulai pada 2013 dengan tujuan untuk bergerak melampaui perdebatan tentang independensi dan akuntabilitas pada tingkat teoritis ke pengembangan metode praktek untuk memetakan dan menganalisa kondisi saat ini. Proyek ini mengidentifikasi semua dokumentasi yang relevan dalam bidang ini. Visi dan indikator ENCJ didasarkan pada analisis standar Eropa dan internasional terkait independensi dan akuntabilitas peradilan.

Topik utama dari proyek ini adalah:

1. Proyek ini berhubungan dengan independensi hakim secara individual, independensi sistem peradilan secara keseluruhan, dan persepsi terhadap independensi. Di dalam penilaian akan terlihat barometer atas bagaimana warga negara mempersepsikan independensi dan termasuk juga penilaian terhadap akuntabilitas.

2. Survei Pengguna Pengadilan;
Untuk mengukur kepuasan masyarakat terhadap pengadilan.
3. Kualitas dari penerapan independensi dan akuntabilitas peradilan.

Di samping pengguna peradilan, proyek independensi dan akuntabilitas peradilan yang dilaksanakan dengan cara survei juga melibatkan hakim-hakim di negara-negara anggota ENCJ sebagai responden. Namun ternyata, tidak semua negara Uni Eropa bersedia untuk mengerjakan survei, salah satunya adalah Romania dan juga Polandia.

Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dalam survei kepada hakim di antaranya: apakah hakim pernah mengalami intervensi, bagaimana jalannya peradilan sesuai pengalaman hakim, dan persepsi mengenai independensi.

Di samping pertanyaan-pertanyaan tersebut, survei independensi dan akuntabilitas juga menanyakan 4 poin di bawah ini:

1. Karakteristik pribadi (jenis kelamin dan pengalaman);
2. Karakteristik pekerjaan (jenis pengadilan dan bidang hukum);
3. Penilaian umum tentang independensi;
4. Dampak kondisi kerja terhadap independensi.

Saat ini, survei dimaksud telah dilakukan sebanyak 4 (empat) kali. Adapun metode survei ditentukan oleh dewan yudisial/peradilan/Kementerian Kehakiman. Hasil survei akan dikirim kembali ke ENCJ untuk diproses.

Berikut survei yang telah dilakukan terhadap hakim tentang independensi mereka:

1. Survei pertama pada 2015: 6.000 hakim menjawab;
2. Survei kedua pada 2017: 11.700 hakim menjawab;
3. Survei ketiga pada 2019: 11.335 hakim menjawab;
4. Survei keempat pada 2022: 15.821 hakim menjawab.

Survei ENCJ 2022

Pada 2022 ENCJ kembali melakukan survei. Terdapat dua poin utama fokus survei ENCJ di 2022, yaitu:

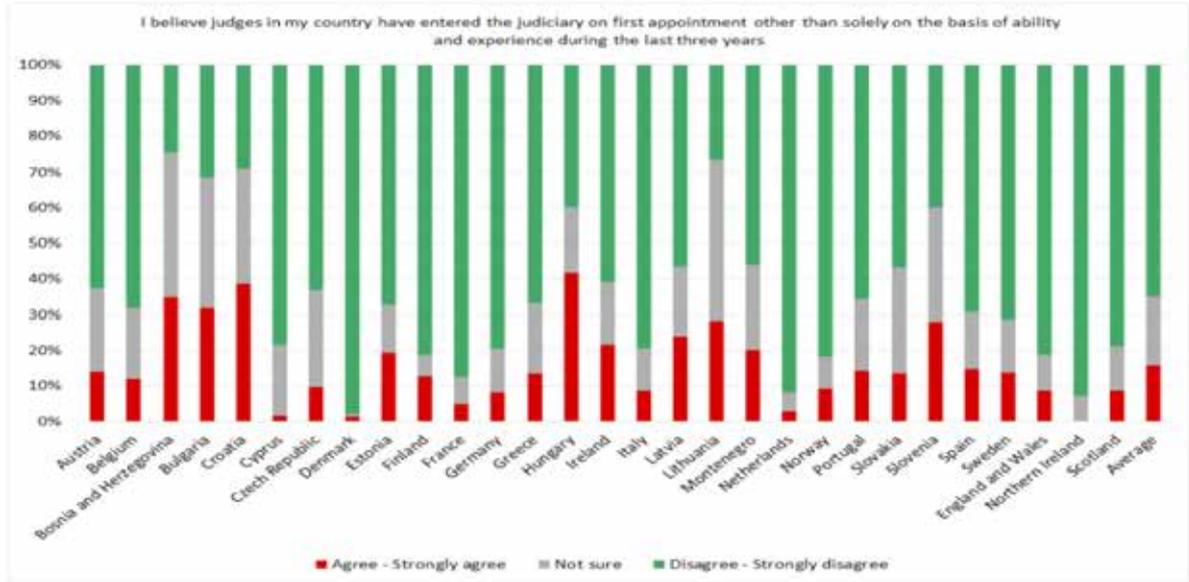
1. Pengangkatan dan promosi hakim;
Sumber daya pengadilan (berhubungan dengan masa pandemik terjadi perubahan ke peradilan melalui digital);

2. Penghargaan terhadap independensi peradilan oleh kekuasaan negara dan media.

Berikut adalah contoh pertanyaan survei yang dilakukan oleh ENCJ

1. Pengangkatan Hakim

Appointment of judges



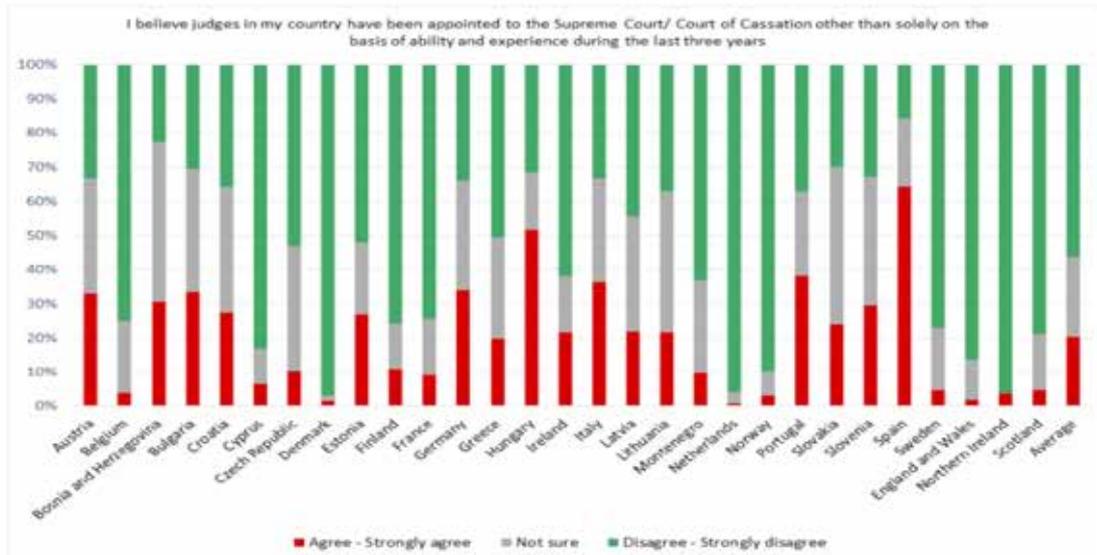
Pertanyaan survei adalah saya percaya bahwa hakim di negara saya telah memasuki peradilan pada pengangkatan pertama selain atas dasar kemampuan dan pengalaman selama tiga tahun terakhir.

Secara singkat dari hasil survei dapat dilihat jika Hungaria memperoleh skor paling tinggi sekitar 40 % hakim percaya ada bias dalam pengangkatan hakim. Kemudian hasil survei terendah atau tidak percaya ada bias dalam pengangkatan hakim di negaranya, adalah Denmark. Hanya sekitar 3% hakim di Denmark yang menjawab percaya.

Rata-rata untuk seluruh Eropa tingkat kepercayaannya adalah 15%. Di Northern Island semua percaya karena di sana hanya ada 15 hakim.

2. Pengangkatan Hakim Agung

Appointment to Supreme Court



Pertanyaan:

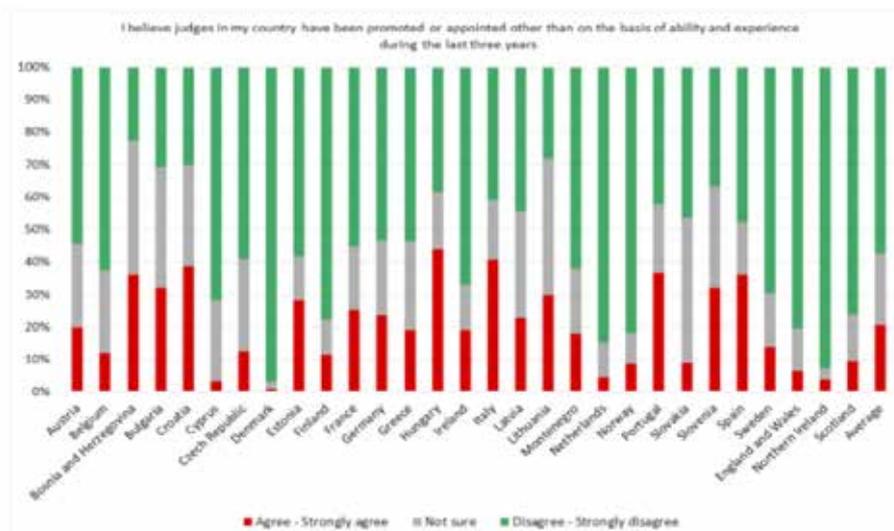
Saya percaya bahwa hakim agung di negara saya dipilih dan diangkat tidak semata-mata berdasarkan kemampuan dan pengalaman selama tiga tahun terakhir.

Dari grafik terlihat, lebih banyak hakim di Eropa yang percaya bahwa pengangkatan hakim agung adalah tidak semata-mata berdasarkan kemampuan dan pengalaman.

Di Belanda, yang memilih setuju sangat rendah, padahal pemilihan hakim agungnya melibatkan Parlemen. Hal ini dikarenakan parlemen di Belanda melaksanakan tugasnya dengan baik, parlemen terlibat tetapi calon yang diajukan berasal dari Dewan Yudisial atau Mahkamah Agung.

3. Promosi Hakim

Promotion of judges

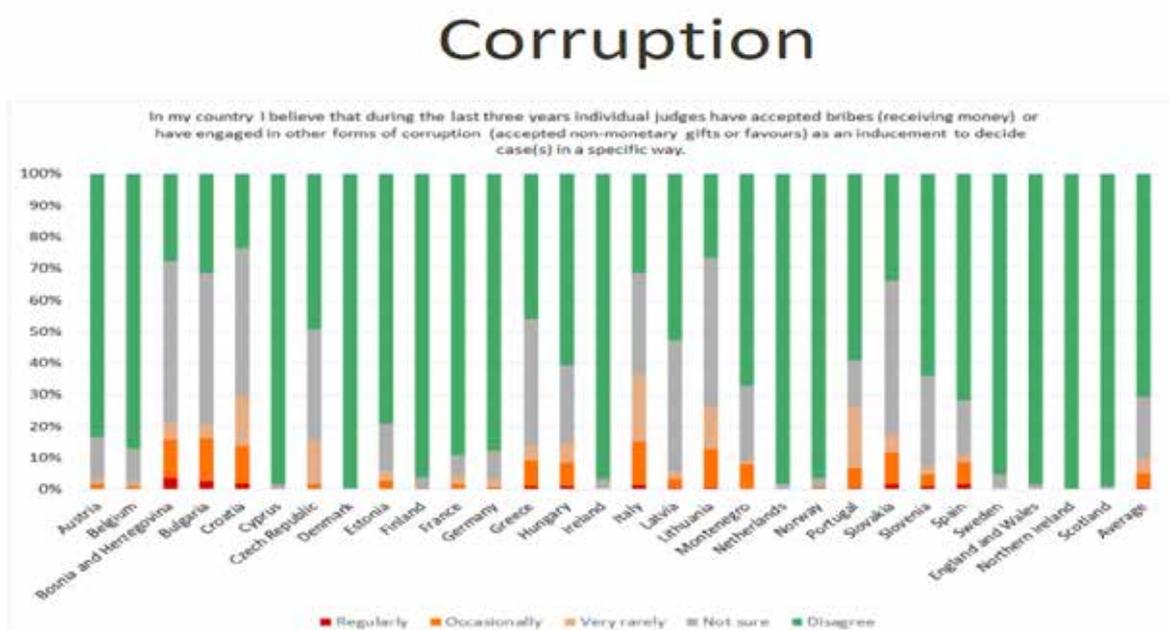


Pertanyaan: Saya percaya bahwa hakim di negara saya diangkat dan mendapatkan promosi selain atas dasar kemampuan dan pengalaman selama tiga tahun terakhir.

Seperti terlihat dari grafik, masih banyak warga Eropa percaya bahwa promosi hakim tidak berdasarkan kemampuan. Negara-negara yang hakim-hakimnya menjawab tidak percaya dengan skor tertinggi adalah Hungaria, Kroasia, Portugal, Spanyol, Bosnia Hergovina, Italia, dan beberapa negara lainnya.

Kemudian negara yang tidak setuju adanya alasan lain, bukan atas dasar kemampuan dan pengalaman selama 3 tahun adalah Denmark. Dari grafik terlihat sekitar 97% hakim-hakim Denmark tidak percaya adanya alasan lain, atau hanya sekitar 3% hakim yang percaya.

4. Korupsi

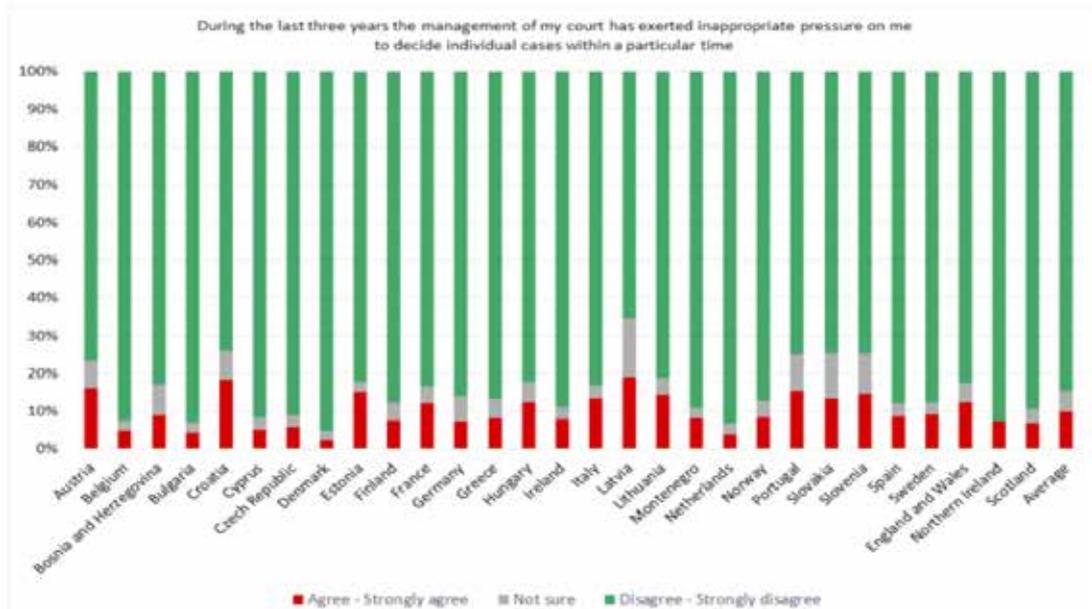


Pertanyaan: Di negara saya, saya percaya bahwa dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun belakangan ini, hakim secara individu telah menerima suap (berupa uang) atau terlibat dalam bentuk korupsi yang lain (menerima hadiah bukan uang atau bantuan lain) sebagai bentuk bujukan untuk membuat keputusan dalam satu kasus dengan cara tertentu.

Pertanyaannya adalah apakah korupsi terjadi secara teratur, kadang-kadang, sangat jarang, tidak yakin dan tidak setuju. Ada kasus besar di Italia beberapa tahun lalu dimana anggota Dewan Yudisialnya tertangkap sedang berdiskusi dengan kementerian untuk mempromosikan seseorang untuk posisi tertentu, bahkan anggota Dewan pun terlibat dalam penyuapan. Jika ada kasus korupsi tentu akan mempengaruhi persepsi hakim. Untungnya di Denmark, diagramnya sangat hijau, begitu juga skor Siprus yang bagus dan juga Swedia.

5. Penghormatan dari Manajemen Pengadilan

Respect by court management

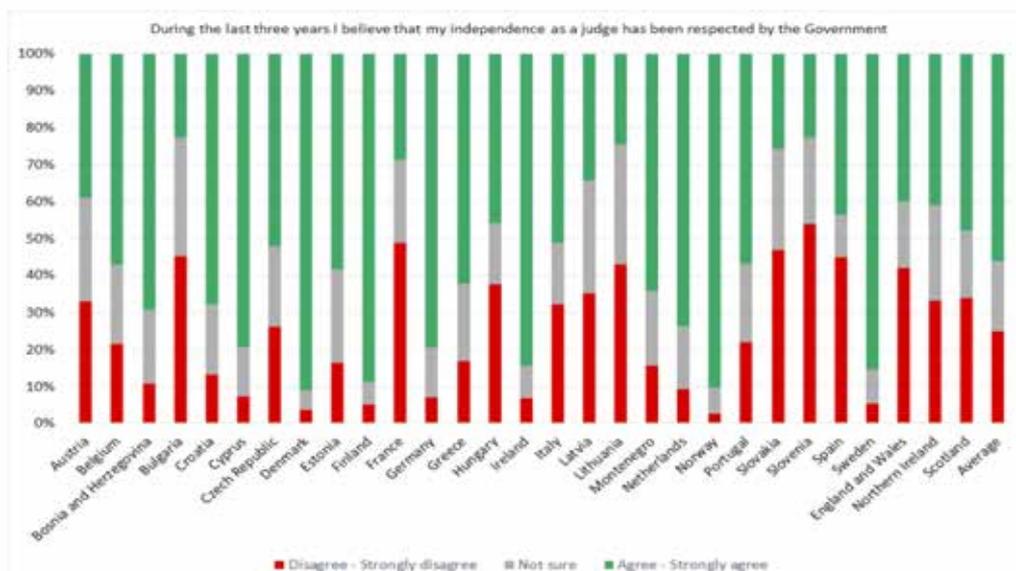


Pertanyaan: Selama 3 tahun ke belakang manajemen pengadilan telah memberikan tekanan yang kurang baik kepada saya sebagai hakim dalam memutuskan kasus individu pada waktu tertentu.

Untuk pertanyaan ini, kembali negara Denmark yang hakim-hakimnya menjawab tidak setuju dengan skor terkecil. Skornya sekitar 2-3%. Yang tidak diduga adalah Perancis dan Italia yang dapat dikatakan negara awal yang membentuk *Judicial Commission* atau *Judicial Council* justru memperoleh skor yang lumayan tinggi. Kedua negara tersebut, memperoleh skor di atas 10%. Artinya hakim-hakim di sana masih mengalami tekanan atau intervensi dalam praktek manajemen peradilan.

6. Penghormatan dari Pemerintah

Respect by Government

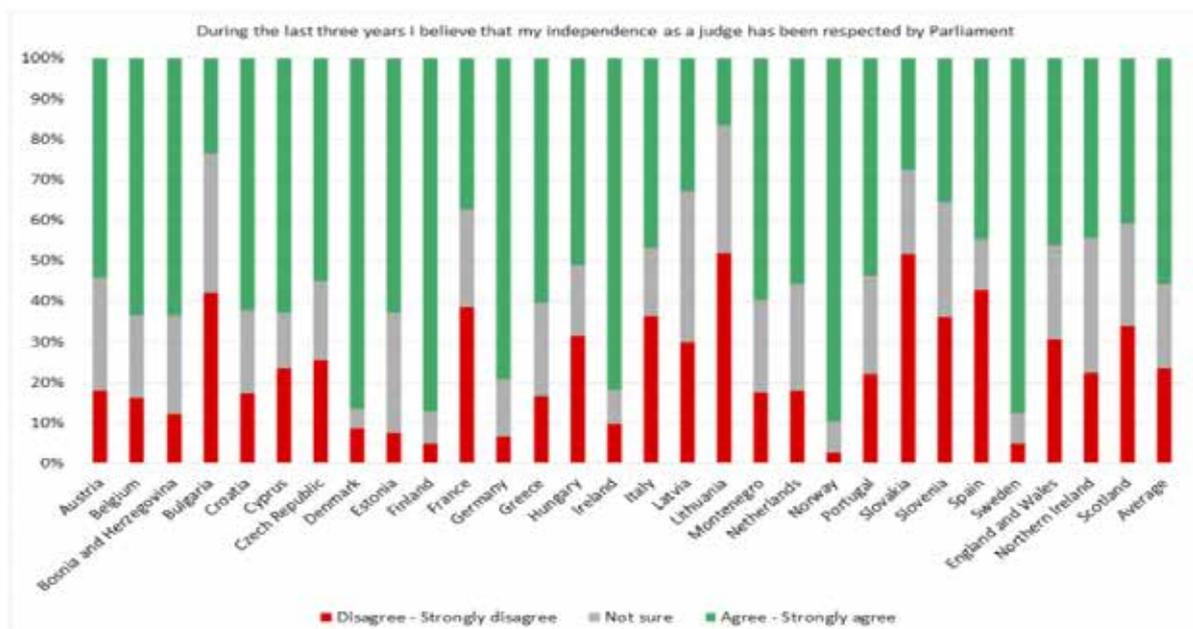


Pertanyaan: Dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun ini, saya percaya bahwa independensi saya sebagai hakim telah dihormati oleh Pemerintah.

Dari grafik terlihat ternyata begitu banyak negara-negara Eropa yang hakimnya masih tidak percaya independensinya dihormati oleh pemerintah. Negara yang skornya paling tinggi adalah Slovenia, hampir 60%. Berikutnya terdapat Perancis, yang nilainya sekitar 50%. Negara-negara lain yang hakim-hakimnya masih tidak percaya independensinya dihormati oleh pemerintah adalah Austria, Slovakia, Bulgaria, Inggris dan Wales, juga Skotlandia.

7. Penghormatan dari Parlemen

Respect by Parliament

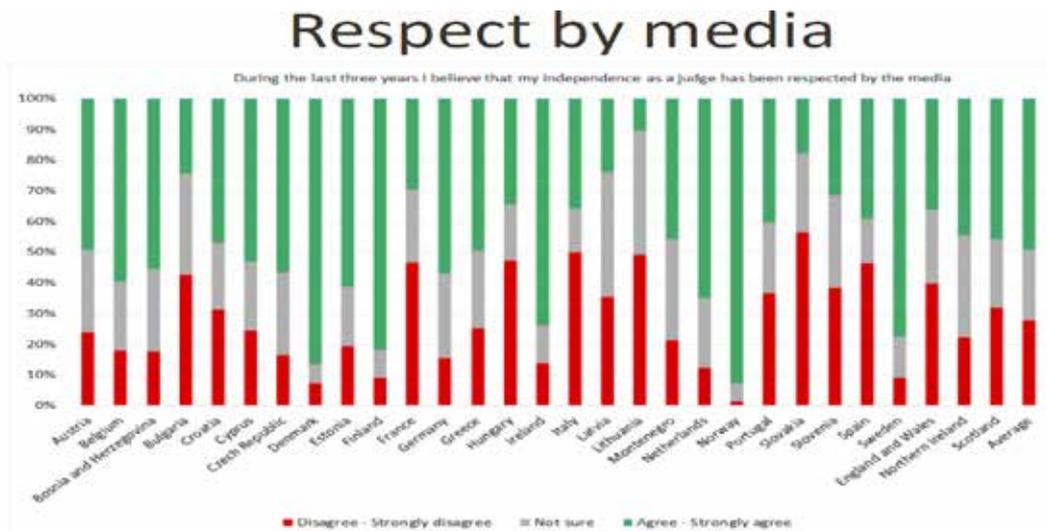


Pertanyaan: Selama 3 tahun ke belakang saya percaya bahwa independensi saya sebagai hakim telah dihormati oleh Parlemen.

Grafik untuk pertanyaan survei ini hampir sama dengan penghormatan pemerintah terhadap hakim. Negara-negara yang hakim-hakimnya masih tidak percaya adanya independensi hakim dari parlemen dapat dikatakan sama dengan negara-negara yang hakim-hakimnya juga tidak percaya independensinya dari pemerintah.

Slovakia, Slovenia, Perancis, Bulgaria, Lithuania, Inggris dan Wales masih menjadi negara yang hakim-hakimnya menjawab tidak setuju dengan skor tinggi, sekitar 40-60%. Sementara negara yang percaya terjadinya penghormatan parlemen atas independensi hakim adalah Norwegia. Hakim-hakim di Norwegia menjawab sekitar 96-98% masih independen dari parlemen.

8. Penghormatan dari Media

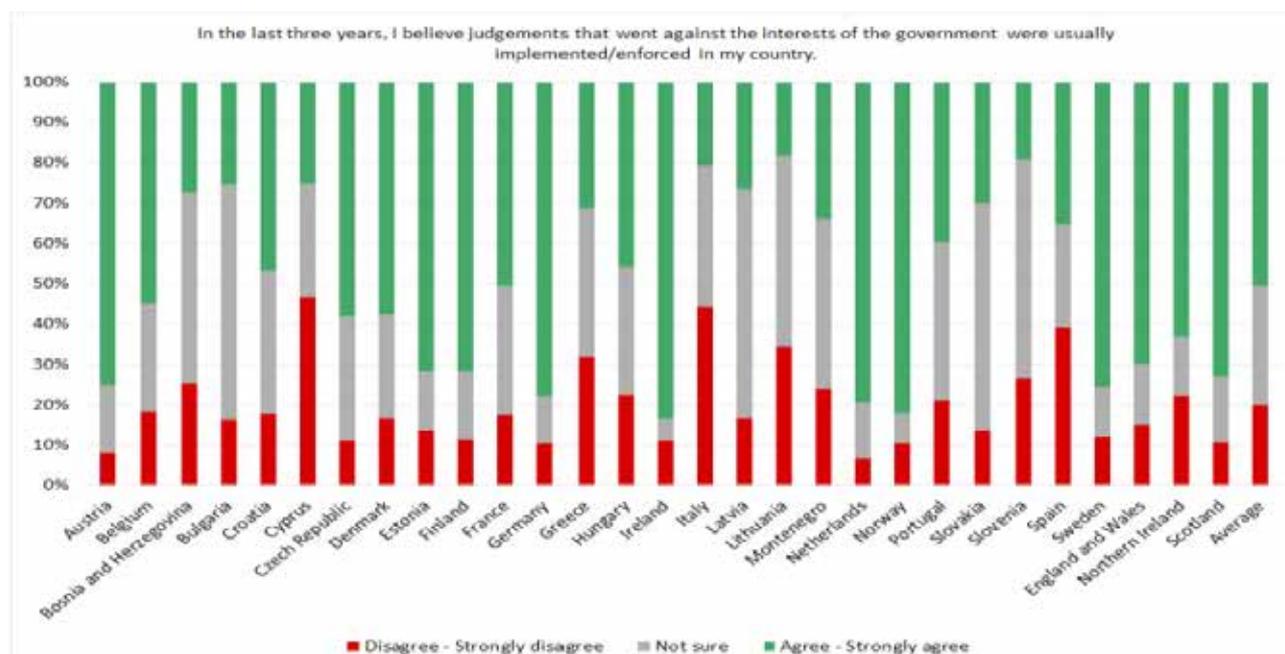


Pertanyaan: Selama 3 tahun ke belakang saya percaya bahwa independensi saya sebagai hakim telah dihormati oleh Media.

Media adalah isu yang besar. Banyak hakim merasa independensi mereka tidak dihormati oleh media. Atas isu tersebut, dalam surveinya, ENCJ juga mengajukan pertanyaan tentang penghormatan dari media.

Grafik menunjukkan jika Norwegia yang hakim-hakimnya beranggapan jika media di sana masih menghormati independensinya. Sementara itu, negara-negara seperti Bulgaria, Prancis, Hungaria, Italia, Slovakia, Spanyol, termasuk Inggris dan Wales memperoleh skor tinggi. Artinya hakim-hakim di sana masih beranggapan jika mereka belum merasakan independensi dari media.

9. Pelaksanaan Putusan



Pertanyaan: Pada kurun waktu 3 tahun belakangan ini, saya percaya keputusan yang bertentangan dengan kepentingan pemerintah biasanya dilaksanakan di negara saya.

Hal ini sangat menarik karena Dewan Yudisial dapat menggunakan data ini untuk didiskusikan dengan Pemerintah. Di Italia 40% hakim merasa jika putusan mereka bertentangan dengan kepentingan pemerintah, maka putusan itu tidak akan dilaksanakan. Hal ini adalah dasar dari *Rule of Law* dimana putusan pengadilan harus dilaksanakan. Jika terdapat banyak pelanggaran, hal itu adalah isu yang serius. Sementara di Belanda berbeda dengan di Italia. Sekitar 80% hakim-hakim di Belanda masih percaya jika putusannya masih akan dilaksanakan oleh pemerintah meski putusan tersebut bertentangan dengan kepentingan pemerintah.

Dari sekian banyak grafik di atas, menunjukkan jika independensi memang masih menjadi permasalahan peradilan. Hal inilah yang membuat ENCJ berkomitmen untuk memperbaikinya, sehingga penghormatan terhadap peradilan, terutama hakim menjadi lebih baik. Tidak hanya dari internal sendiri, tapi juga dari pemerintah, parlemen, dan media.



Penyerahan cinderamata dari KY ke RvdR
Kiri Ke Kanan: Amzulian Rifai, Hank Naves, M. Taufiq HZ, dan Binziad Kadafi

Den Haag, 28 Oktober 2022

Pada kunjungan ke Belanda pada 28 Oktober 2022, lembaga yang pertama kali delegasi KY kunjungi adalah *Raad voor de Rechtspraak* (RvdR). Dalam kunjungannya ke RvdR, delegasi KY diterima oleh Presiden RvdR, Hank Naves, Jos Puts (Direktur Keuangan), Harry Koster (Direktur Sistem IT Peradilan), Fatima Kadieva dan Remy van Aanholt, *officer* pada RvdR.

Sejarah Singkat dan Tugas RvdR

Raad voor de Rechtspraak didirikan sekitar 20 tahun yang lalu. Dalam sistem kekuasaan kehakiman di Belanda, posisi *Raad voor de Rechtspraak* berada di tengah antara lembaga yudisial dengan lembaga eksekutif. Keberadaannya di tengah lembaga yudisial dengan eksekutif itu membuat RvdR dikenal sebagai *buffer*, yaitu lembaga yang menjaga supaya politik tidak ikut campur pada peradilan di Belanda.

Tugas-tugas RvdR adalah menjaga kualitas pengadilan, baik pengadilan negeri maupun pengadilan banding, mengelola sekolah hakim/pendidikan untuk hakim, mengelola sistem informasi peradilan di Belanda, dan pusat layanan sistem peradilan dimana ada panitera disana. Di samping tugas-tugas itu, RvdR juga mempunyai tugas sebagai pengelola anggaran atau *budgeting* peradilan. Maksudnya adalah dalam setiap kurun waktu tiga tahun sekali, RvdR membuat anggaran peradilan yang kemudian akan diajukan atau disampaikan ke Menteri Kehakiman. Apabila anggaran yang sudah

diajukan itu telah diperoleh dari pemerintah, RvdR akan membaginya kepada pengadilan negeri dan pengadilan banding. Ketika telah dibagi, tugas RvdR berikutnya adalah mengawasi penggunaan anggaran oleh peradilan.

Tugas *budgeting* peradilan yang dilakukan oleh RvdR dilaksanakan secara mandiri oleh RvdR. “Jadi memang benar anggaran peradilan yang diajukan oleh RvdR ke pemerintah tidak menjadikan pemerintah sebagai “atasan” dan berhak mengatur pengelolaan anggaran peradilan yang dilakukan RvdR. Anggaran peradilan yang diberikan pemerintah melalui usulan RvdR tetap dikelola secara independen oleh RvdR,” jelas Naves. “Itulah makanya RvdR bertindak sebagai *buffer*, mengawasi penggunaan anggaran peradilan dan mengawasi politik untuk tidak campur tangan terhadap peradilan, yang kadang kala diintervensi pemerintah dan juga parlemen”, tambah Naves.

Penjelasan Naves tersebut membuat delegasi KY begitu mengapresiasi keberadaan RvdR di Belanda. “Saya perhatikan, kelebihan KY disini adalah struktur organisasinya yang terpisah, baik dengan parlemen maupun dengan pemerintah termasuk juga MA. Sebagai perbandingan problem di banyak negara termasuk di Indonesia, kalau kita bicara KY, kewenangan untuk menjamin independensi peradilan justru tidak dimiliki oleh KY. Dengan RvdR mempunyai peran *budgeting* peradilan dapat dikatakan membuat peradilan menjadi sangat respek dengan RvdR. Apalagi juga menjadi lembaga yang mencegah politik mengintervensi peradilan”, ungkap Rifai.

“Tentu kondisi saat ini tidak terjadi dengan sendirinya. *Raad voor de Rechtspraak* juga sebelumnya melalui banyak dinamika sebelum menjadi seperti sekarang”, respon Naves terhadap pernyataan apresiasi Rifai terhadap lembaga RvdR.

Tugas lain dari RvdR adalah lembaga yang bertanggung jawab akhir dalam rekrutmen hakim dan petugas pengadilan. Selain itu, RvdR juga bertanggungjawab dalam penunjukan kepala peradilan, serta memberikan saran kepada pembuat kebijakan, jika ada hukum/kebijakan baru.

Jumlah Penduduk, Hakim dan Usia Pensiun Hakim

Beberapa tahun belakangan ini penduduk Belanda terus meningkat. Di 2021 jumlah penduduk di Belanda menjadi sekitar 17,5 juta orang. Dari 17,5 juta penduduk di Belanda, sekitar 2.600 orang berprofesi sebagai hakim.

Usia pensiun hakim-hakim di Belanda adalah 70 tahun. Namun ketika pandemi Covid-19, terdapat kebijakan terhadap usia pensiun hakim, yaitu hakim dapat bertugas hingga usia 73 tahun.

Berikutnya, jumlah putusan yang telah diputus oleh sekitar 2600 hakim setiap tahunnya adalah sekitar 1,5 juta putusan. Kasus yang paling banyak diputus di Belanda adalah kasus perdata. Meski begitu, perhatian penduduk atau publik di Belanda lebih menaruh perhatian yang besar terhadap kasus-kasus pidana. Alasannya adalah karena media-media di Belanda banyak mengulas perkara-perkara pidana.

Komposisi RvdR

Komposisi RvdR terdiri atas lima anggota *fulltime*, yaitu 3 hakim dan 2 non hakim. Komposisi seperti ini, jumlah hakim lebih banyak dibandingkan non hakim, bertujuan agar RvdR dapat melakukan tugasnya dengan baik. Kemudian keberadaan pimpinan yang tidak berasal dari lingkup hakim (non hakim) dibutuhkan karena tugas RvdR tidak hanya menjaga kualitas pengadilan (baik tingkat pertama maupun banding), tapi juga bertugas mengelola sekolah hakim/pendidikan untuk hakim, mengelola sistem informasi peradilan di Belanda, dan pusat layanan sistem peradilan dimana ada panitera disana.

3 hakim yang menjadi komisioner RvdR merupakan hakim aktif, bukan pensiunan. Dari 3 hakim tersebut, salah satu di antaranya Naves, karena paling lama bertugas di RvdR (6 tahun), selain menjalankan tugas sebagai Ketua RvdR, juga masih dapat memegang kasus. Selanjutnya, untuk ketiganya, karena masih merupakan hakim aktif, pasca menjadi komisioner RvdR masih bisa melanjutkan tugas sebagai hakim biasa lagi.

Syarat Menjadi Komisioner RVDR dan Seleksi Komisioner RvdR

Pada *tahap pertama*, lowongan untuk menjadi komisioner RvdR diumumkan melalui publikasi di *website* RvdR. Kemudian, pada *tahap kedua* dibentuk komisi pemilihan yang akan melakukan seleksi komisioner RvdR. Komisi ini tidak hanya terdiri dari anggota RvdR, tapi ada juga hakim yang berasal dari pengadilan. Pada tahap ini, komisi pemilihan akan merekomendasikan 1 orang calon kepada pemerintah. *Tahap ketiga*, atau yang terakhir adalah wawancara dengan pemerintah, dalam hal ini Menteri Kehakiman. Secara kebiasaan komisi pemilihan hanya merekomendasikan satu orang kepada pemerintah untuk kemudian diwawancarai agar mengetahui apakah calon yang direkomendasikan itu memang adalah pilihan yang tepat atau bukan. Tapi tentunya hal ini tidak mengartikan Menteri Kehakiman akan menolak rekomendasi dari komisi pemilihan. Jika melihat sejarahnya, setiap nama yang dicalonkan komisi pemilihan tidak pernah ditolak oleh menteri.

Syarat-syarat menjadi komisioner RvdR dari jalur hakim, tidak hanya diperuntukkan oleh hakim-hakim pengadilan tinggi, tapi hakim-hakim pengadilan negeri juga boleh mendaftar. Namun untuk lowongan Ketua RvdR, yang boleh mendaftar hanya ketua pengadilan. Hal ini yang menjadikan Naves terpilih menjadi Ketua RvdR, dikarenakan sebelumnya Naves pernah menjabat sebagai ketua pengadilan selama 10 tahun.

Sementara itu untuk lowongan non hakim, kandidatnya harus berasal dari pegawai negeri sipil. Semua jenjang pegawai negeri sipil berhak untuk mendaftar, namun secara kebiasaan, dalam seleksi yang akan dipilih adalah pegawai negeri sipil yang posisinya sudah di atas/senior. Fokus komisi pemilihan untuk lowongan non hakim adalah mencari calon yang mempunyai pengetahuan yang cukup bagaimana pengaturan anggaran di pemerintahan dilakukan. Hal ini dikarenakan komisioner RvdR itu nantinya yang bertanggung jawab pada peran anggaran peradilan. Selanjutnya untuk calon komisioner lainnya, fokus komisi pemilihan ada pada kemampuan membuat digitalisasi *sharing* atau secara umum adalah teknologi informasi. Ini dikarenakan peran komisioner itu nantinya adalah sistem mutu dalam sistem pengadilan.

Proses Penganggaran Pengadilan dan Besaran Alokasi per Kasus



Jos Puts ketika menjelaskan mengenai penganggaran pengadilan ke delegasi KY

Den Haag, 28 Oktober 2022

Pembahasan berikutnya dalam pertemuan delegasi KY Indonesia dan RvdR adalah perihal keuangan peradilan. Paparan keuangan peradilan disampaikan oleh Jos Puts (Direktur Keuangan).

Jumlah hakim di Belanda per 2020 adalah 1.893 orang, yang terdiri dari 1.497 hakim pengadilan distrik atau negeri dan 396 hakim pengadilan banding/*appeal court*. 1.497 hakim yang bertugas di pengadilan negeri terdiri atas beberapa bidang, seperti hukum perdata perdagangan, keluarga, pajak, pidana, administrasi, subdistrik. Sementara itu pada tingkat banding terdiri atas 4 (empat) bidang di antaranya perdata perdagangan, keluarga, pajak, dan pidana.

Selanjutnya untuk anggaran, RvdR memperoleh anggaran dari pemerintah adalah 1 Miliar €/Rp 15,5T untuk tahun 2022. Anggaran sebesar itu digunakan untuk gaji personil/karyawan, gaji hakim, pembelian/penyewaan karpet gedung pengadilan, hingga sewa gedung pengadilan. “Jadi jika diperhatikan dari segi nilai memang besar, tapi yang perlu ditekankan adalah nilai sebesar itu bukan untuk RvdR sendiri, melainkan lebih banyak buat peradilan. Di sisi lain, anggaran sebesar itu diupayakan oleh RvdR dengan cara mengajukan anggaran ke pemerintah. Tidak hanya mengajukan, tapi juga menjelaskan maksud anggaran sebesar itu”, jelas Puts.

Raad voor de Rechtspraak memperoleh anggaran itu melalui koordinasi langsung kepada pemerintah, dan juga parlemen. Hal ini dikarenakan, sebelum pemerintah memberikan anggaran kepada RvdR, usulan anggaran tersebut juga harus mendapatkan persetujuan dari parlemen/DPR. Usulan yang RvdR ajukan melalui pemerintah, selalu disetujui oleh parlemen, mengingat RvdR

mengajukan usulan anggaran sesuai dengan kebutuhan RvdR. Sejak berdiri tahun 2002, RvdR sudah 5 kali rapat dengan pemerintah. Dalam rapat tersebut kerap terjadi perdebatan, hingga akhirnya usulan anggaran tersebut diajukan kepada parlemen.

Dalam praktik yang lain, ada kalanya RvdR langsung melakukan koordinasi dengan parlemen apabila pemerintah tidak menyetujui usulan anggaran dari RvdR. “Kami biasanya yang mengundang parlemen untuk menjelaskan usulan anggaran kami. Kami sampaikan ke parlemen jika kebutuhan anggaran sudah sesuai kebutuhan kami dan untuk peradilan, namun usulan tersebut tidak disetujui oleh pemerintah. Oleh karena itu, RvdR berharap parlemen bisa berkoordinasi dengan pemerintah agar usulan RvdR disetujui dan memberikan anggaran sesuai usulan RvdR,” cerita Puts.

Anggaran sebesar Rp. 15,5T secara rincian lebih banyak digunakan untuk gaji personil pengadilan, mulai dari hakim sampai dengan pegawai yang biasanya bertugas melakukan fotokopi. Jumlah persentase untuk gaji dari Rp. 15,5T adalah 76%. Sementara itu persentase sisanya adalah untuk sewa gedung pengadilan, biaya program pendidikan hakim, dan anggaran yang penggunaannya untuk RvdR.

Kemudian anggaran untuk peradilan tadi langsung dibagikan kepada pengadilan. Anggaran untuk pengadilan negeri adalah sekitar € 38-72 juta, sementara pengadilan banding adalah antara € 25-45 juta. Anggaran itu digunakan pengadilan untuk membayar gaji, membeli komputer dan peralatan kebutuhan pengadilan lainnya, dan sewa gedung.

Poin penting dari penganggaran peradilan adalah pemerintah memberikan anggaran yang diajukan oleh RvdR. Ketika RvdR sudah memperoleh anggaran dari pemerintah kemudian memberikan kepada pengadilan-pengadilan sesuai dengan alokasi yang telah diajukan. Setiap pengadilan yang telah memperoleh anggaran berhak untuk mengelola anggaran tersebut secara mandiri, tanpa campur tangan dari pemerintah, termasuk juga dari RvdR. Meskipun begitu, RvdR berhak untuk mengawasi penggunaan anggaran pengadilan agar digunakan sebagaimana mestinya. Praktik seperti ini sudah terjadi sejak 2002, sejak RvdR dibentuk. Sebelum 2002, anggaran langsung dibagikan pemerintah ke pengadilan.

Anggaran pengadilan disusun dengan kombinasi “p x q” dan *fixed amount*. Pada 2005-2020 100% anggaran peradilan berdasarkan output, yaitu “p” berarti *price* dikali “q” berarti *quantity*. “Cara sederhana untuk menentukan anggaran pengadilan berdasarkan mekanisme “p x q” adalah RvdR membuat perkiraan nilai per satu kasus. Tentu saja ini perkiraan ke depan, dan jika anggaran itu kurang kami akan tambah lagi dan jika berlebih kami akan mengawasi untuk anggaran itu kembali lagi ke kami”, ujar Puts.

Pada 2020 hingga sekarang dasar menentukan anggaran peradilan berubah. Sekitar 60% anggaran peradilan berdasarkan *output*, kemudian 40% sisanya merupakan anggaran yang sudah fix atau tetap selama 3 (tiga) tahun. Untuk memberikan gambaran anggaran yang berdasarkan *output*, berikut tabel yang berisikan informasi alokasi anggaran yang diberikan ke setiap pengadilan dan jumlah produksi, yang berarti realisasi dari alokasi anggaran tersebut.

In 2021, the Judiciary handled fewer cases in almost all areas of law than agreed beforehand with the Ministry.

Tabel 4 Productie in aantal zaken in 2021 ten opzichte van de afspraken met de minister van JenV (afgerond op tientallen)

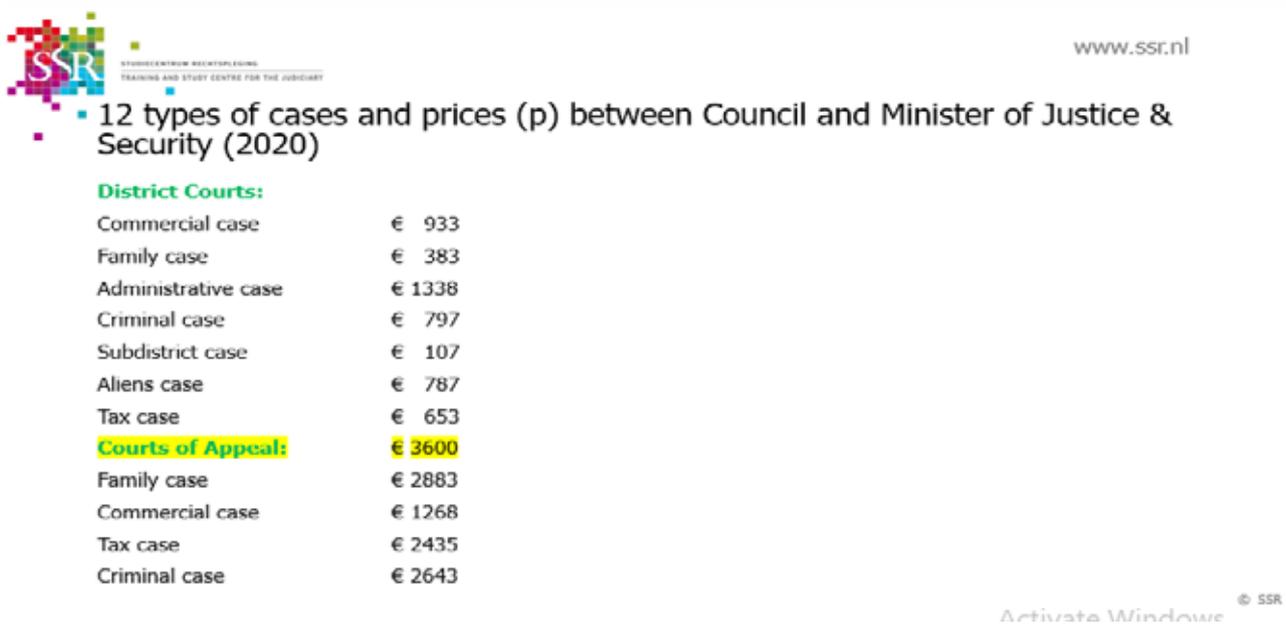
| | Begroting afspraken in aantallen | Productie in aantallen | Productie t.o.v afspraken |
|--------------------------|--|---------------------------|---------------------------------|
| Rechtbanken | | | |
| Kanton | 1.062.270 | 877.250 | 83% |
| Civiel handel | 86.020 | 55.380 | 64% |
| Civiel familie | 193.450 | 181.100 | 94% |
| Straf | 178.450 | 167.010 | 94% |
| Bestuur | 36.800 | 32.900 | 89% |
| Vreemdelingenkamers | 40.770 | 27.810 | 68% |
| Belasting | 30.240 | 31.400 | 104% |
| Gerechtshoven | | | |
| Civiel handel | 8.210 | 6.610 | 81% |
| Civiel familie | 5.350 | 5.280 | 99% |
| Straf | 30.820 | 28.800 | 93% |
| Belasting | 4.890 | 4.830 | 99% |
| Bijzonder college | | | |
| Centrale Raad van Beroep | 5.170 | 5.600 | 108% |
| Totaal | 1.682.440 | 1.423.970 | 85% |

Activate Windows © SSR
Go to Settings to activate Win

Dari gambar di atas, kolom kedua dari kiri, yang ada keterangan warna biru dan kuning merupakan kolom realisasi dalam bentuk persentase, yang di tengah kolom realisasi anggaran, dan kolom pertama berikutnya lagi adalah alokasi anggaran yang telah diberikan RvdR kepada setiap pengadilan. Ilustrasinya di mana ada realisasinya di kedua dari kiri dan yang tengah kasus yang telah diselesaikan. Apabila diperhatikan dengan seksama, sepanjang 2021 hanya ada dua jenis pengadilan yang outputnya atau penggunaan anggaran lebih besar dari alokasi yang diberikan, yaitu *belasting* (hukum pajak) dan *Central Raad van Beroep* (Pengadilan Banding) untuk perusahaan. Sementara lainnya, anggaran yang digunakan lebih kecil dari alokasi anggaran yang diberikan.

Biaya atau harga yang harus dibayarkan untuk satu penanganan perkara di tingkat pengadilan negeri dan pengadilan banding berbeda-beda. Di pengadilan tingkat pertama, anggaran penanganan satu perkara yang tertinggi adalah perkara administrasi, yaitu € 1338 dan yang terendah adalah perkara perdata, sebesar € 383. Kemudian di tingkat banding biaya penanganan perkara yang terendah adalah pengadilan perdata perdagangan, yaitu € 1,268 dan yang tertinggi adalah pengadilan perdata, sebesar € 2,883.

Lebih jelasnya, gambaran biaya perkara setiap perkara di Belanda dapat dilihat di tabel di bawah ini:



www.ssr.nl

12 types of cases and prices (p) between Council and Minister of Justice & Security (2020)

| District Courts: | |
|---------------------|--------|
| Commercial case | € 933 |
| Family case | € 383 |
| Administrative case | € 1338 |
| Criminal case | € 797 |
| Subdistrict case | € 107 |
| Aliens case | € 787 |
| Tax case | € 653 |
| Courts of Appeal: | |
| Family case | € 2883 |
| Commercial case | € 1268 |
| Tax case | € 2435 |
| Criminal case | € 2643 |

Activate Windows © SSR

Praktik penggunaan anggaran pengadilan di Belanda tidak selamanya berjalan dengan baik. Beberapa kali juga ditemukan kendala di dalam pelaksanaannya. Sebut saja sejak pandemi Covid-19, pengadilan mengalami kesulitan dalam penanganan perkara. Dikarenakan pandemi, jumlah perkara yang masuk ke pengadilan berkurang. Akibatnya adalah rendahnya produksi perkara. Lebih jauh lagi mengakibatkan adanya anggaran yang tersisa di pengadilan. Kejadian seperti ini membuat RvdR dan pengadilan menyampaikan argumentasi penyebabnya ke pemerintah agar pemerintah paham penyebab anggaran *output* kurang terealisasi dengan baik.

Anggaran *output* yang tersisa, maka akan disimpan di dalam deposito. Hal ini menjadikan pengadilan-pengadilan di Belanda harus mempunyai deposito. Jadi anggaran tersebut tidak dikembalikan kepada pemerintah, tapi bisa dimasukkan ke deposito pengadilan atau deposito pemerintah. Anggaran tersisa itu nantinya masih bisa digunakan jika suatu saat dibutuhkan. “Dapat dikatakan anggaran sisa itu jadinya dana cadangan ke depan yang masih bisa digunakan jika dibutuhkan. Dan hal ini yang membedakan dengan Indonesia. Di Indonesia, setahu saya yang pernah bertugas di Kedutaan Belanda di Indonesia, jika terdapat anggaran yang sisa dari Kementerian/Lembaga itu harus dikembalikan kepada negara. Tapi di Belanda tidak demikian. Bisa disimpan di deposito pemerintah atau pengadilan, yang pengadilan masih gunakan lagi ketika dibutuhkan”, jelas Puts.

Pada sesi tanya jawab, tiga komisioner KY yang menjadi delegasi Indonesia secara bergantian mengajukan pertanyaan kepada Puts. Binziad Kadafi menanyakan kesejahteraan hakim, Amzulian Rifai menanyakan anggaran keamanan pengadilan, dan terakhir M. Taufiq bertanya perihal pihak yang melakukan pengamanan pengadilan.

Untuk kesejahteraan hakim di Belanda, Puts menyampaikan jika bukan menjadi tanggung jawab RvdR. Gaji hakim ditentukan oleh pemerintah dan organisasi profesi, yang di Indonesia disebut IKAHI. Apabila dalam rapat tersebut disepakati perlu menaikkan gaji hakim pada tahun berikutnya, maka hasilnya harus disampaikan ke RvdR agar dialokasikan usulan penambahan tersebut. Kemudian untuk anggaran keamanan pengadilan itu telah masuk pada alokasi 40% anggaran fix (*fixed amount*) yang ditentukan setiap tiga tahun sekali. “yang bertanggung jawab dengan keamanan pengadilan adalah polisi dan walikota. Jadi 11 pengadilan negeri dan 4 pengadilan banding, keamanannya diatur oleh polisi dan walikota. Adapun anggaran keamanannya, sebagaimana sudah saya jelaskan tadi itu masuk ke 40% *fixed amount* yang ditetapkan tiga tahun sekali. Tapi anggaran itu bisa saja bertambah jika ternyata ada kasus khusus yang pengamanannya menggunakan jasa tim SWAT”, jawab Puts.

Sistem Penjaminan Mutu Peradilan



Koster menjelaskan sistem penjaminan mutus peradilan didampingi oleh Fatima Kadieva dan Remy van Aanholt, *officer* pada RvdR

Den Haag, 28 Oktober 2022

Dalam pertemuan berikutnya dengan RvdR, Harry Koster yang merupakan Direktur Sistem IT Peradilan menjelaskan sistem mutu pengadilan di Belanda kepada delegasi KY. Sistem mutu pengadilan yang dibangun RvdR merupakan sistem yang bertujuan untuk menjaga kualitas peradilan. Untuk proses sistem jaminan mutu berjalan dengan baik dan lancar, RvdR membuat sistem mutu yang mudah diakses oleh setiap pengadilan di Belanda, dan dikembangkan secara berkala.



Sistem penjaminan mutu pengadilan Belanda prosesnya seperti gambar di atas. Gambar yang diberi warna biru yang pertama itu merupakan fase perencanaan, yakni visi, misi, dan agenda strategis. Secara umum, semua perencanaan sistem penjaminan mutu pengadilan di pengadilan berujung pada perencanaan di tengah, yaitu dengan mengaplikasikan tiga komponen, di antaranya:

1. *Human Resources Management* (HRM);
2. Rencana tahunan; dan
3. Pembiayaan.

Untuk gambar yang diberi warna kuning adalah bagian masyarakat yang dapat melihat apa yang sudah dilakukan, dan dapat memberikan masukan/kritik (riset, klien dan kunjungan). Dalam hal ini RvdR menerapkan PDCA (*Plan, Do, Check, and Action*). Bagian ini merupakan bagian yang fokus pada pengembangan, perbaikan, dan pembaharuan sistem penjaminan mutu pengadilan.

Model sistem penjaminan mutu pengadilan di atas dikembangkan oleh Institut Kualitas Belanda (INK) dan berasal dari model EFQM Eropa. Model ini didasarkan pada siklus *Plan-Do-Check-Act*. Dengan melalui siklus ini berulang-ulang, peradilan bekerja secara sistematis untuk meningkatkan kualitasnya.

Dalam melakukan sistem penjaminan mutu pengadilan, visi dan misi RvdR adalah:

1. Visi
Mewujudkan peradilan yang adil, mudah diakses, tepat waktu, transparan dan tanggap terhadap perkembangan sosial.
2. Misi
Melindungi hak-hak dan kebebasan, mempertahankan demokrasi berdasarkan aturan hukum, memastikan bahwa hukum diterapkan dengan benar dan kasus-kasus diputuskan oleh hakim-hakim yang independen, tidak memihak, etis dan ahli.

Dalam upaya mewujudkan visi itu, RvdR membutuhkan manajemen sumber daya manusia (SDM), atau *human resource management* (HRM) yang akan fokus untuk melihat potensi dari orang/ hakim atau pegawai pengadilan. Di samping itu, juga melihat hal-hal yang menjadi kebutuhan SDM di pengadilan. Salah satu contoh yang dilakukan selama ini, misalnya untuk hakim, seseorang ketika ingin menjadi hakim harus mengikuti pendidikan terlebih dulu. Pendidikan berlangsung selama 4 (empat) tahun. Karena pendidikannya harus berlangsung selama 4 tahun, maka proses asesmennya tidak bisa dilakukan dalam 1 tahun, tetap harus sampai selesainya pendidikan tersebut.

Poin lainnya dalam upaya mewujudkan visi dan misi, RvdR menyusun rencana tahunan. Rencana tahunan dimaksud disusun RvdR bersama-sama dengan setiap ketua pengadilan. Dalam menyusun rencana tahunan RvdR dan para ketua pengadilan menetapkan objek atau fokus pada elaborasi nyata terhadap kebijakan yang berkaitan pada visi dan misi, anggaran, dan perencanaan. Kemudian bagaimana objek itu diupayakan, akan disusun rencana tahunan peradilan, agenda implementasi dari

rencana tahunan peradilan tersebut, dan rencana tahunan pengadilan. Indikator dalam mengupayakan rencana tahunan tersebut adalah kualitatif dan kuantitatif dari objek tadi.

Sebagai contoh, RvdR dan para ketua pengadilan dalam proses menyusun agenda untuk tahun 2023-2025. Terdapat empat pilar penting dalam rencana ini, yaitu ketepatan waktu, kualitas digitalnya harus sesuai dengan yang direncanakan, kualitas dari proses peradilan, dan pengembangan sumber daya yang ada di peradilan, dilakukan dengan memberikan pelatihan-pelatihan yang mereka butuhkan, juga diberikan pelatihan tambahan.

Di samping SDM, dan rencana tahunan, poin lain dalam upaya mewujudkan visi dan misi RvdR adalah anggaran. Anggaran yang dimaksud di sini ditujukan untuk pengembangan pengetahuan, teknologi berupa sarana dan prasarana yang bisa membuat pekerjaan hakim dan aparat peradilan berjalan dengan tepat waktu.

Bagian terpenting dari penjaminan mutu pengadilan adalah proses yang berlangsung di pengadilan, yakni bagaimana orang-orang dapat bekerja sama untuk mempertahankan kualitas peradilan. Proses ini dijabarkan ke beberapa poin, di antaranya proses peradilan yang profesional, standar profesional (kualitas kerja hakim ditentukan oleh hakim itu sendiri yaitu tentang bagaimana menjalankan peradilan yang berkualitas). Lebih jelasnya, proses menjaga mutu peradilan dapat dimaknai adalah hakim harus bekerja secara profesional, bagaimana mengelola jalannya sidang, dan bagaimana menyambungkan argumen-argumen dalam menangani perkara.

Bukti nyata dari penjaminan mutu peradilan ini adalah tidak ditemukannya hakim-hakim melakukan pelanggaran. Hal ini bisa terjadi karena mengupayakan perwujudan penjaminan mutu hakim-hakim juga dilibatkan dalam pembuatan penyusunan standar prosedur profesionalisme ini.

Berkaitan dengan aduan, memang benar pada 2021 masih terdapat aduan masyarakat terhadap hakim. Tapi jika diperhatikan angka kuantitatifnya, dapat dikatakan jumlah sangat kecil, hanya sekitar 2,800 an dari 15,5 juta kasus per tahun. “Jadi ini masih sedikit dibandingkan dengan total kasus. Dan keluhan yang masuk itu kebanyakan kasusnya sendiri, bukan kepada kepada hakim yang kurang adil dan juga tidak berdasar (contohnya: marah karena kalah)”, cerita Koster.

Aspek penting dari penjaminan mutu ini adalah memastikan apakah mutu sudah sesuai dengan yang sudah ditetapkan di awal atau yang sudah direncanakan. Upaya untuk memastikan hal tersebut adalah melalui survei. Terdapat 3 jenis survei yang dilakukan, yaitu:

1. Survei ke pegawai peradilan setiap 4 tahun sekali. Para aparat peradilan akan diberikan angket atau kuesioner yang berisikan tentang apa yang mereka rasakan atau apa yang terjadi dalam peradilan, misal prosedur dalam penanganan perkara, aksesibilitas kepada pengguna peradilan, fasilitas, kualitas *website* pengadilan di dalam menyampaikan informasi-informasi mengenai peradilan, dan komprehensif tidaknya sebuah putusan atau kualitas putusan;
2. Survei kepada pengguna peradilan/eksternal setiap 2 tahun sekali. Survei ini dilakukan untuk mengukur tingkat kepuasan dari pengunjung peradilan terhadap layanan peradilan, seperti

kinerja hakim dan peradilan, kepemimpinan, kerja sama dan beban kerja;

3. Asesmen yang dilakukan setiap 4 tahun sekali. Fokus pada *assessment* yang dilakukan oleh komite independen. Asesmen ini adalah “*quality assurance within the courts*”.

Sejarah, Tugas, dan Struktur Organisasi HR



Suasana pertemuan delegasi Indonesia dengan perwakilan *Hoge Raad*

Den Haag, 28 Oktober 2022

Lembaga kedua yang delegasi KY kunjungi di Belanda pada 28 Oktober 2022 adalah *Hoge Raad* atau MA Belanda. Dalam kunjungannya ke *Hoge Raad*, delegasi KY diterima oleh Hans Storm yang merupakan panitera dan Aafke Woller, seorang deputi kepaniteraan di *Hoge Raad*.

Dalam sambutannya, Woller menyampaikan jika delegasi *Hoge Raad*, yakni dirinya sendiri dan Hans Storm akan secara bergantian menjelaskan informasi umum tentang *Hoge Raad*, pengangkatan hakim agung, dan tentang kamar keempat *Hoge Raad* kepada delegasi Indonesia.

Sistem Peradilan Belanda dan Sejarah *Hoge Raad*

Peradilan Belanda terdiri dari 11 pengadilan tingkat pertama, dan 4 pengadilan banding. *Hoge Raad* adalah MA untuk kasus perdata, pidana, dan pajak. Ada juga 3 pengadilan banding administratif khusus untuk masing-masing kasus jaminan sosial, kasus administrasi ekonomi, dan semua kasus administrasi lainnya. Tidak ada pengadilan tingkat ketiga di atas pengadilan-pengadilan tersebut. *Hoge Raad* tidak hanya merupakan MA untuk Belanda, tetapi juga untuk wilayah luar negeri Kerajaan Belanda di Karibia. (Aruba, Curaçao, Sint Maarten en Bonaire, Sint Eustatius en Saba)

Hoge Raad didirikan pada 1838, karena kebutuhan akan putusan yang berlaku secara nasional dan untuk mendorong kesatuan hukum. *Hoge Raad* memutuskan perkara-perkara yang biasanya telah ditangani oleh dua tingkatan yurisdiksi: pengadilan negeri dan pengadilan banding. *Hoge Raad* adalah pengadilan kasasi, yang berarti bahwa *Hoge Raad* tidak menetapkan fakta-fakta dari suatu kasus baru tetapi meninjau kembali apakah pengadilan sebelumnya menafsirkan hukum dengan benar, mengikuti prosedur yang benar, dan cukup membuktikan putusannya. Oleh karena itu, hakim *Hoge Raad* tidak menilai fakta-fakta, tetapi membatasi diri pada aspek hukum dari suatu kasus.

Tugas Utama *Hoge Raad*

Hoge Raad mempunyai 3 tugas utama, yaitu:

1. Mempromosikan kesatuan hukum;
Secara tradisional inilah alasan utama mengapa pengadilan tinggi didirikan. Tidak menjadi masalah apakah publik pergi ke pengadilan distrik di Amsterdam atau di Belanda Utara untuk masalah hukum yang sama. Kesatuan hukum menawarkan kesetaraan yang lebih besar di antara warga negara dan membuat putusan pengadilan lebih dapat diprediksi oleh warga negara.
2. Memberikan kontribusi pada pengembangan hukum;
Legislator merancang aturan, tetapi tidak selalu dapat mengantisipasi semua situasi potensial yang termasuk di dalam ruang lingkungannya. Berbagai pengadilan di Belanda mungkin memberikan penilaian yang berbeda untuk kasus-kasus yang tidak terantisipasi, seperti perkembangan teknologi baru. Dengan penafsiran hukum yang otoritatif, *Hoge Raad* dapat merumuskan aturan yang menjadi aturan hukum yang eksis. Dengan cara ini, *Hoge Raad* dapat mengembangkan hukum dan memberikan kejelasan pada praktik hukum.
3. Memberikan perlindungan hukum bagi rakyat;
Legislator merancang hukum dalam arti umum, sementara pengadilan biasanya memberikan penilaian dalam kasus-kasus individual. Dalam putusnya, pengadilan Belanda juga dapat mempertimbangkan Hukum Eropa dan internasional, seperti perjanjian hak asasi manusia, dan doktrin hukum tidak tertulis. Ketika meninjau apakah pengadilan negeri atau pengadilan banding menafsirkan hukum dengan benar dan mengikuti prosedur yang benar, *Hoge Raad* akan memberikan perlindungan hukum dalam kasus-kasus individual. Keputusan tersebut juga dapat mempengaruhi orang lain selain pihak-pihak yang terlibat, yang mungkin mengarah pada bentuk perlindungan hukum yang lebih umum.

Ketika *Hoge Raad* memenuhi tugasnya secara memadai, hal ini mendorong kepastian hukum di Belanda. Hal ini sangat penting dalam kaitannya dengan *rule of law* dan kepercayaan warga negara terhadap lembaga peradilan. Penjelasan tersebut menunjukkan putusan *Hoge Raad* juga dapat relevan bagi orang lain di luar pihak yang terlibat, yang dapat memberikan nilai tambah pada putusan. Melalui putusan-putusan tersebut, *Hoge Raad* menciptakan *case law* atau yurisprudensi, yang dapat dianggap sebagai pembuatan hukum yudisial.

Struktur Organisasi *Hoge Raad*

Hoge Raad memiliki 3 divisi yang terpisah, antara lain:

1. Pengadilan (dalam bahasa Belanda: *de Raad*). Pengadilan dibagi menjadi kamar perdata, pidana, dan pajak;
2. Divisi selanjutnya adalah Kantor *Procurator General*, Deputi, dan *Advocates General*. Mereka

memberikan nasihat independen kepada para anggota pengadilan, yang dikenal sebagai '*advisory opinion*', tentang bagaimana memutuskan perkara yang dihadapkan kepada mereka. Divisi ini meliputi 25 orang secara keseluruhan. Para *Advocates General* bekerja di bagian perdata, pidana, atau pajak *Hoge Raad*. *Procurator General* memiliki berbagai tugas khusus yang terlalu banyak. Untuk memberikan gambaran tugasnya seperti pengawasan terhadap penuntutan umum, menangani pengaduan terhadap hakim, yang akan dibahas dalam bagian kamar keempat.

3. Yang terakhir adalah Direktur Operasional dan stafnya yang ditugaskan untuk memfasilitasi tugas-tugas pengadilan dan kantor *Procurator General*. Misalnya dukungan hukum dari departemen penelitian (yang semuanya adalah asisten yudisial) dan dukungan kesekretariatan dari staf administrasi. Divisi ini berjumlah kurang lebih 200 orang staf.

Seleksi Hakim Agung di Belanda



Penyerahan Plakat dari *Hoge Raad* kepada Delegasi KY Indonesia

Den Haag, 28 Oktober 2022

Komposisi dan Keberagaman

Paparan perihal seleksi hakim agung di Belanda dijelaskan oleh Storm. Dalam paparannya Storm mengawalinya dengan menyampaikan jumlah hakim agung di Belanda, latar belakang hakim agung, komposisi dan keberagaman usia, serta diversitas dari hakim agung di Belanda.

Jumlah hakim agung atau komposisi dari *Hoge Raad* adalah 34 orang. Ke 34 hakim agung ini terdiri atas 1 orang ketua, dan 11 orang hakim agung pada masing-masing kamar. Di setiap kamar di *Hoge Raad* ditunjuk 1 orang ketua kamar.

Setiap hakim agung mempunyai latar belakang pendidikan dan pekerjaan yang bervariasi di masing-masing kamar. *Hoge Raad* memiliki hakim yang sepanjang karirnya berasal dari latar belakang pendidikan dan karir sebagai hakim, namun ada anggota juga yang berasal dari latar belakang akademisi/guru besar perguruan tinggi. Selain itu, terdapat juga dari praktisi hukum seperti pengacara atau badan konsultasi untuk kamar pajak.

Untuk usia hakim agung di Belanda, secara komposisi, setiap kamar memiliki keberagaman usia. Hal ini terjadi karena *Hoge Raad* telah mengatur agar dalam satu kamar komposisinya tidak berasal dari satu kelompok umur saja. Di samping mempertimbangkan perihal keberagaman usia hakim agung pada setiap kamar, *Hoge Raad* juga mempertimbangkan perbandingan antara pria dan wanita. Perbandingannya adalah 40% anggota *Hoge Raad* merupakan wanita dan 60% adalah pria.

Namun perbandingan tersebut dalam proses dipertimbangkan, apakah akan tetap dengan perbandingan 60:40 atau akan diubah. “Mulai dari 10 tahun yang lalu, kami berusaha membuat keseimbangan ini menjadi sama-sama 50% dengan melihat situasi masyarakat”, kata Storm.

Satu tantangan terbesar *Hoge Raad* ke depan adalah dari segi diversitas yaitu kebangsaan atau etnis. Sebagaimana diketahui Belanda merupakan salah satu negara yang terdiri dari beraneka ragam suku dan keturunan. Hal ini menjadikan *Hoge Raad* mempunyai keinginan agar komposisi di *Hoge Raad* mencerminkan hal tersebut. Tantangan dalam mewujudkan hal itu adalah *Hoge Raad* masih kesulitan mencari anggota atau hakim yang *non-western*. Namun hal tersebut tidak membuat *Hoge Raad* khawatir dikarenakan *Hoge Raad* yakin pasti akan ada. Keyakinan ini muncul karena *Hoge Raad* bercermin ke perguruan tinggi. Di Belanda, perguruan-perguruan tinggi memiliki banyak lulusan yang berasal dari *non-western*, dan telah terjun menjadi praktisi hukum maupun akademisi di bidang hukum.

Harapan lain yang ingin *Hoge Raad* capai adalah menjadi mahkamah tertinggi di bidang pidana, perdata, pajak, dan memiliki hakim-hakim yang mempunyai kemampuan hukum yang beragam. Meskipun begitu, *Hoge Raad* pada dasarnya berupaya mencari orang-orang yang generalis yang bisa di semua kamar. Sesuai namanya generalis, latar belakang yang beragam, dan bisa juga menangani kasus yang variatif. Selain generalis, *Hoge Raad* juga butuh spesialis di beberapa ranah hukum yang sangat spesifik dan mendalami bidang hukum tersebut. Karena pada kasus spesifik tersebut, hakim-hakim harus mendalami bidang tersebut agar putusannya sesuai, contohnya *International Private Law* dan Hak Cipta.

Advocate General

Di *Hoge Raad* juga terdapat *advocate general*. *Advocate general* ini memiliki pengetahuan dan latar belakang hukum yang memang memadai dan layak. Hal itu menjadi penting karena *advocate general* harus memberikan rekomendasi yang sangat mendalam dan spesifik dalam pembuatan keputusan dari segi hukum.

Di tengah Storm menjelaskan paparannya, delegasi Indonesia, yakni Kadafi, Rifai, dan M. Taufiq mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada Storm. Pertanyaan yang diajukan seperti, apakah *procurator general* itu sama dengan Jaksa? Apakah ada syarat agar suatu kasus bisa masuk menjadi kasasi? Dan antara kasasi dari perdata dengan pidana, mengapa harus dibedakan spesialisasi pengacaranya?

Di Belanda, *procurator general* tidak hanya ada di Kejaksaan Agung, tapi juga ada di *Hoge Raad*. *Procurator general* yang ada di *Hoge Raad* tidak memiliki kaitan atau hubungan dengan Kejaksaan Agung. “Jadi *procurator general* di Belanda itu berdiri sendiri, dan mandiri, bukan bagian dari Kejaksaan Agung. Hal ini diatur di Konstitusi Belanda”, jelas Storm. Dikarenakan bersifat mandiri, maka *procurator general* yang terdapat di *Hoge Raad* tidak memiliki kewajiban melaporkan diri ke Kejaksaan Agung atau tidak berada di bawah kewenangan Kejaksaan Agung.

Di *Hoge Raad*, *procurator general* dianggap sebagai *advisor* paling penting. Sebagai *advisor*, *procurator general* terdiri dari 20 sampai dengan 24 *advocate general*. Tugas-tugas *procurator general* ini adalah membuat kesimpulan dan memberikan pandangan hukum terhadap kasus yang masuk ke *Hoge Raad* yang diharapkan menjadi satu kesatuan putusan *Hoge Raad*. Tidak hanya itu, *procurator general* juga bertugas meneliti ketentuan hukum, peraturan, dan referensi hukum, kitab hukum terkait peraturan hukum, serta juga membandingkan sesuatu di Kitab Hukum Belanda dengan peraturan hukum internasional sehingga kesimpulan mereka berdasarkan riset. Tugas lain dari *procurator general* ini adalah meneliti dan memberikan *advise* ke *Hoge Raad* berkaitan dengan permohonan kasasi yang diajukan. Banyak tugas yang menjadi tanggung jawab dari *Hoge Raad* yang dibagikan kepada para *procurator general* untuk meneliti kasus yang masuk.

Syarat Perkara Diajukan Kasasi

Syarat dari sebuah perkara bisa sampai pada tingkat kasasi adalah putusan perkara tersebut merupakan putusan tingkat banding, bukan putusan tingkat pertama. “Di Belanda, tidak boleh sebuah perkara yang diputus di tingkat pengadilan negeri langsung diajukan kasasi. Jadi harus ke tingkat banding terlebih dulu jika memang beranggapan putusan tingkat pertama masih ada yang keliru sehingga perlu diperbaiki di tingkat banding”, ujar Storm. Syarat lainnya adalah harus ada pernyataan tertulis berupa argumentasi mengapa perkara tersebut memang layak diajukan kasasi.

Syarat-syarat penunjukan Hakim di *Hoge Raad*

Dalam peraturan perundang-undangan di Belanda disebutkan hanya ada 2 syarat untuk menjadi hakim agung, yaitu warga negara Belanda dan latar belakang pendidikan yang sesuai dengan lowongan. Sementara itu untuk masa kerja tidak menjadi syarat jika ingin mencalonkan diri sebagai hakim agung di Belanda. “Hakim-hakim di pengadilan negeri juga dapat menjadi kandidat hakim agung. Hakim pengadilan negeri yang biasanya dijadikan calon atau kandidat adalah yang mempunyai karir yang bagus, pengaruh sosial di masyarakat yang juga bagus. Salah satu hakim pengadilan negeri yang menjadi hakim agung adalah Dineke de Groot (Presiden *Hoge Raad*), yang berasal dari Pengadilan Amsterdam”, kata Storm.

Dalam rangka memperoleh calon hakim agung yang terbaik dari jalur hakim, *Hoge Raad* membuat profil semua hakim di Belanda. Storm menyampaikan jika *Hoge Raad* terus berupaya mencari orang-orang terbaik di ketiga kamar yang dapat dinaikkan menjadi Hakim Agung.

Proses pencarian hakim agung di Belanda merupakan proses yang berlangsung terus-menerus. *Hoge Raad* terus mencari, berupaya untuk selalu “buka mata buka telinga” agar dapat menemukan hakim di pengadilan negeri maupun pengadilan banding yang memiliki karir bagus, sehingga bisa dimasukkan ke daftar *Hoge Raad* dan menjadi kandidat *Hoge Raad* untuk menjadi hakim agung.

Seleksi hakim agung di Belanda saat ini berbeda dari sebelumnya. Dulu seorang calon dapat kapan saja memperoleh telepon dari Ketua *Hoge Raad* untuk diminta menjadi Hakim Agung. “Pernah

ada cerita seorang hakim yang ditelepon pada hari sabtu pagi oleh Ketua *Hoge Raad*. Hakim tersebut diminta oleh Ketua *Hoge Raad* untuk menjadi hakim agung. Dikarenakan di hari libur dan pagi hari, hakim ini merasa terkejut, sehingga menyampaikan ke Ketua *Hoge Raad* kalau butuh waktu untuk berpikir terlebih dulu. Ketua *Hoge Raad* menjawab hakim tersebut kalau hakim tersebut boleh saja berpikir terlebih dulu, namun batas waktunya hanya sampai hari Senin pagi”, cerita Storm mengenai seleksi calon hakim yang dulu pernah dilakukan di Belanda.

Berbeda dengan yang dulu, proses seleksi calon hakim saat ini memiliki tahapan seleksi dan transparan. Sejak 2018 *Hoge Raad* telah membuat profil dan prosedur rekrutmen hakim agung. Prosedur atau mekanisme rekrutmen tersebut telah dipublikasikan ke dalam website *Hoge Raad*.

Pengisian jabatan hakim agung di Belanda dilakukan apabila terdapat satu atau lebih hakim agung dari 34 hakim agung yang memasuki masa purnabakti atau pensiun. Profil hakim agung yang pensiun itu nantinya digunakan untuk mengetahui calon hakim seperti apa yang *Hoge Raad* butuhkan, apakah itu yang laki-laki atau perempuan, suku, atau yang spesialis atau generalis. Selanjutnya *Hoge Raad* akan berdiskusi dan melihat komposisi masing-masing kamar.

Dalam pencarian hakim agung di Belanda, setiap kamar akan membuat daftar hakim yang direkomendasikan untuk mengikuti semacam seleksi calon hakim agung. Calon hakim yang dianggap potensial didorong mengikuti seleksi hakim agung karena dinyatakan sesuai dengan kebutuhan *Hoge Raad*. Kebutuhan di sini lebih pada profilnya, setidaknya sama dengan hakim agung yang pensiun tersebut. Apabila dari daftar yang ada ternyata tidak ada yang cocok dengan profil yang dibutuhkan, maka *Hoge Raad* akan mencari calon hakim agung di luar daftar tersebut.

Contohnya, jika terdapat seorang hakim pengadilan negeri, sebut saja Pengadilan Negeri Amsterdam yang masuk ke dalam *list Hoge Raad*, maksudnya adalah sudah sesuai dengan kebutuhan, maka *Hoge Raad* akan berusaha menjalin komunikasi dengan Ketua Pengadilan Amsterdam. Tujuan dari menjalin komunikasi ini adalah agar ketua pengadilan tersebut mengetahui bahwa salah satu hakimnya sedang dilakukan pendekatan. Berikutnya *Hoge Raad* akan mengundang hakim dimaksud untuk mengikuti wawancara orientasi. Pada proses ini *Hoge Raad* mengawalinya dengan menyampaikan jika hakim tersebut masuk ke dalam *list Hoge Raad* sebagai calon hakim agung karena dianggap memiliki kapasitas dan potensial. Pasca itu *Hoge Raad* akan menanyakan ke calon apakah tertarik untuk menjadi hakim agung atau tidak. Jika calon tersebut menunjukkan ketertarikan, maka hakim ini akan dinyatakan sebagai hakim yang bersedia dicalonkan untuk menjadi hakim agung.

Proses selanjutnya adalah calon tersebut akan mengikuti wawancara secara internal dengan ketua kamar. Hasil dari wawancara tersebut akan dibahas atau didiskusikan dengan hakim-hakim yang ada di kamar tersebut. Pasca melakukan diskusi secara internal oleh satu kamar, maka hasilnya akan ke Komisi Advis untuk diwawancara. Komisi Advis yang nantinya akan memberikan penilaian lebih lanjut kepada calon tersebut. Hasil wawancara yang dilakukan oleh Komisi Advis ini yang nantinya disampaikan Ketua *Hoge Raad* untuk kemudian merekomendasikan mengikuti proses eksternal.

Secara komposisi, Komisi Advis terdiri dari enam orang yaitu tiga hakim agung yang berasal dari perwakilan masing-masing kamar. Artinya setiap kamar akan diwakili masing-masing satu hakim agung di dalam Komisi Advis. Selain dari hakim agung setiap kamar, Komisi Advis ini juga diisi oleh 1 hakim agung yang senior, dan 2 orang berasal dari eksternal *Hoge Raad*. Kedua orang eksternal ini adalah satu orang yang berlatar belakang tokoh senior, dan satu orang dari tokoh masyarakat. Tokoh masyarakat yang tergabung dalam Komisi Advis ini biasanya adalah seorang guru besar di Erasmus dan aktif di forum-forum internasional.

Proses eksternal seleksi hakim agung di Belanda dimulai dengan penyampaian rekomendasi Ketua *Hoge Raad* kepada parlemen Belanda. Rekomendasi yang disampaikan oleh Ketua *Hoge Raad* merupakan hasil seleksi yang dilakukan secara internal. Untuk 1 lowongan calon hakim yang akan diisi, Ketua *Hoge Raad* harus mengajukan 6 nama kandidat ke Parlemen. 6 kandidat yang direkomendasikan oleh *Hoge Raad* disusun berdasarkan peringkat. Tidak hanya peringkat, tapi juga ada penjelasan mengapa calon tersebut diusulkan.

Jumlah nama calon hakim agung yang *Hoge Raad* usulkan ke parlemen setiap seleksi adalah 6 orang. Jumlah ini tidak pernah kurang dan tidak pernah lebih. Ke-6 orang kandidat tersebut berasal dari 3 kamar. Begitu juga jika terdapat kondisi lowongan hakim yang kosong lebih dari satu. “Berapa pun lowongan hakim agung yang akan diisi, *Hoge Raad* tetap akan mengusulkan 6 nama ke parlemen. Jadi *Hoge Raad* memberikan 6 nama kandidat untuk 3 kamar, yaitu 2 orang dari kamar perdata, 2 orang dari kamar pidana, dan 2 orang dari kamar pajak”, ujar Storm.

Dari 6 nama kandidat yang direkomendasikan oleh *Hoge Raad*, secara kebiasaan dalam praktik, parlemen akan menjadikan 3 nama pertama yang direkomendasikan ke pemerintah. Dari tiga nama yang diusulkan oleh parlemen tadi, pemerintah akan memilih salah satu untuk mengisi satu lowongan hakim agung yang kosong. Selama ini pemerintah memilih nama yang berada pada peringkat pertama untuk ditunjuk menjadi hakim agung dan ditetapkan, juga disumpah oleh Raja Belanda.

Pelaksanaan seleksi calon hakim agung, baik secara internal maupun eksternal memiliki dasar hukum. Yang eksternal dasar hukumnya adalah UU, sementara internal adalah peraturan *Hoge Raad* atau *Judicial Officers Legal Status*. Peraturan tersebut mulai diimplementasikan sejak Januari 2020.

Kamar Keempat



Kiri Ke Kanan: Kadafi, Storm, M. Taufiq, dan Rifai

Den Haag, 28 Oktober 2022

Bagian terakhir dari paparan yang disampaikan oleh delegasi Belanda kepada delegasi KY Indonesia adalah tentang kamar keempat *Hoge Raad*. Paparan ini disampaikan oleh Aafke.

Sebagaimana penjelasan sebelumnya, *Hoge Raad* Belanda terdiri atas empat kamar, yaitu perdata, pidana, pajak, dan kamar keempat yaitu pengawasan. Pada kamar keempat ini, secara komposisi diisi oleh hakim-hakim agung yang berasal dari 3 kamar lainnya. Jumlah anggota kamar keempat ini adalah 11 hakim agung. Kamar ini diketuai oleh Ketua *Hoge Raad*, dan wakil ketuanya adalah satu perwakilan dari masing-masing kamar. Kemudian tujuh sisanya juga merupakan perwakilan dari masing-masing kamar lainnya.

Kamar keempat secara garis besar menangani 3 jenis perkara. Kamar ini menangani permohonan yang berhubungan dengan pengaduan hakim *Hoge Raad*, pengaduan terhadap petugas pengadilan, dan kasus-kasus yang berhubungan dengan penangguhan dan pemberhentian petugas pengadilan (termasuk kasus-kasus disipliner). Dua tipe kasus terakhir merupakan bagian dari tugas khusus *Hoge Raad* dimana *procurator general* mempunyai peranan khusus di sini. Hanya *procurator general* yang mempunyai wewenang hukum untuk mengajukan perkara ke kamar keempat *Hoge Raad*, baik atas dasar permohonan ataupun kekuasaannya dan memiliki diskresi untuk menolak atau menerima permohonan.

Pada tahun 2021, kamar ini tidak menangani banyak kasus. Dari data yang ada, hanya sekitar enam putusan dijatuhkan oleh kamar ini pada tahun 2021.

Pengaduan Perilaku Terhadap Hakim

Pengaduan atau laporan terhadap hakim harus berkaitan dengan perilakunya dalam melaksanakan tugas resminya, bukan berhubungan dengan isi putusan pengadilan. Proses pengaduan diawali dengan pihak yang berperkara atau pihak lain yang terlibat harus terlebih dulu mengajukan pengaduan internal di pengadilan tempat hakim bertugas. Kemudian pengadilan tersebut melanjutkan aduan dimaksud kepada *procurator general*. Ketika *procurator general* mengajukan permohonan kepada *Hoge Raad*, biasanya akan diberi tanggapan atas pengaduan dari pihak yang berperkara atau pihak lain yang terlibat. Menanggapi permohonan *procurator general*, kamar keempat akan memberikan keputusan, yang terkait hakim yang telah berperilaku tidak pantas.

Penangguhan dan Pemberhentian Aparat Peradilan

Prosedur yang berkaitan dengan penangguhan dan pemberhentian hakim diatur dalam *the Dutch Judicial Officers Legal Status Act*. Berdasarkan UU ini, kasus-kasus yang berkaitan dengan status hukum para hakim juga perlu diajukan oleh *procurator general* kepada *Hoge Raad*, baik atas dasar permintaan atau karena jabatannya.

Kasus yang menyangkut status hukum hakim biasanya berasal dari permintaan otoritas fungsional hakim yang bersangkutan. Dalam banyak kasus ketua pengadilan di tempat hakim bertugas, yang menyampaikan permintaan. Kasus-kasus dimaksud biasanya termasuk tindakan disipliner, sakit atau ketidakmampuan penuh atau sebagian untuk bekerja. Selain itu, hakim juga dapat diberhentikan atas permintaannya sendiri.

Seorang hakim harus diberhentikan oleh *Hoge Raad* apabila menerima jabatan atau kedudukan yang secara hukum tidak sesuai dengan jabatan yang dipegangnya sebagai hakim. Seorang hakim juga dapat diberhentikan oleh *Hoge Raad* jika telah dihukum karena melakukan tindak pidana berdasarkan putusan final.

Ada beberapa sanksi disiplin yang dapat dikenakan kepada hakim. Sanksi teguran resmi. Untuk sanksi ini, dapat dan biasanya diberikan oleh ketua pengadilan. Selain sanksi teguran, masih ada beberapa sanksi disiplin lainnya yang bisa dijatuhkan kepada hakim. Sanksi disiplin yang dimaksud adalah penahanan gaji, penangguhan paling lama 3 bulan, dan pemberhentian yang hanya dapat dijatuhkan oleh *Hoge Raad*, atas permintaan *procurator general*.

Di dalam *The Dutch Judicial Officers Legal Status Act* terdapat bagian khusus tentang tindakan disipliner. Bagian ini mencakup Pasal 46c, yang berisi daftar lengkap pelanggaran atau tindakan yang termasuk pelanggaran disipliner.

Selama 11 tahun Storm menjabat sebagai panitera, baru satu hakim yang pernah dikenakan sanksi disiplin.



**KOMISI YUDISIAL
REPUBLIK INDONESIA**

Jl. Kramat Raya No. 57 Jakarta Pusat
Telp : 021 390 5876 , Fax : 021 390 6189, PO BOX 2685
website : www.komisiyudisial.go.id

